

LAPORAN AKTUALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI *WEB BASED* DALAM PEMBUATAN ISU SEPEKAN



Disusun oleh:

Nama : Ir. Muhammad Zulfikar Emir Zanggi, S.T., M.T.
NIP : 199307202024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI

Pemanfaatan Teknologi Informasi *Web Based*
dalam Pembuatan Isu Sepekan

Nama : Ir. Muhammad Zulfikar Emir Zanggi, S.T., M.T.
NIP : 199307202024041001
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan

Jakarta, 4 Oktober 2024

Peserta Diklat,



Ir. Muhammad Zulfikar Emir Zanggi, S.T., M.T.
NIP. 199307202024041001

Mengetahui,

Coach



Izzaty, S.T., M.E.
NIP. 197712052009122001

Menyetujui,

Mentor



Dr. Ariesty Tri Mauleny, S.Si., M.E.
NIP. 197503262009122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XI Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Rasa hormat penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama menyusun Laporan Aktualisasi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. sebagai Kepala Pusat Analisis Keparlemenan yang mendukung penuh penulis untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.
2. Ibu Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E. sebagai mentor dan telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam meningkatkan kualitas Laporan Aktualisasi ini.
3. Ibu Izzaty, S.T., M.E. sebagai *coach* yang telah memberikan waktu, pikiran, arahan, dan saran dalam meningkatkan kualitas Laporan Aktualisasi ini.
4. Bapak Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. selaku penguji yang telah menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Laporan Aktualisasi ini.
5. Para Widyaiswara Pusat Pengembangan Kompetensi Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah menjadi fasilitator dalam pendalaman dan penguatan setiap agenda mata pelatihan dasar CPNS.
6. Pusat Analisis Keparlemenan selaku satuan kerja tempat di mana penulis beraktivitas dan melaksanakan kegiatan aktualisasi;
7. Teman-teman CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI Angkatan XI dan Angkatan XII tahun 2024 yang selalu memberi inspirasi dan dukungan di setiap kegiatan Pelatihan Dasar CPNS
8. Seluruh keluarga dan sahabat yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam tulisan ini, sehingga saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan Laporan Aktualisasi ini.

Jakarta, 15 Oktober 2024

 Peserta

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Tujuan.....	4
1.4. Manfaat.....	4
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN	6
2.1. Visi dan Misi Organisasi	6
2.2. Struktur Organisasi.....	7
2.3. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	8
BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS.....	10
3.1. Identifikasi Isu.....	10
3.1.1 Pemilihan Isu Prioritas	14
3.2. Analisis Isu.....	16
3.3. Gagasan Pemecahan Isu	17
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI	21
4.1. Matriks Rancangan Aktualisasi.....	21
4.2. Jadwal Kegiatan	29
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI	32
5.1. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	32
5.2. Penjelasan Tahapan Kegiatan.....	32
5.3. <i>Stakeholder</i>	41
5.4. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	41
5.5. Analisis Dampak	42
BAB VI PENUTUP	45
6.1. Kesimpulan.....	45
6.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penapisan Isu Instansi/Unit Kerja	14
Tabel 2. Pemilihan Gagasan Kreatif	18
Tabel 3. Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS	22
Tabel 4. Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	29
Tabel 5. Kendala dan Strategi Rancangan Aktualisasi.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Produk-Produk (<i>Output</i>) Analis Legislatif.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keahlian.....	7
Gambar 3. Wawancara dengan Analis Legislatif Senior.....	10
Gambar 4. Contoh Pergantian PIC Penulis, Editor, dan <i>Layouter</i> dalam Isu Sepekan.....	11
Gambar 5. Contoh Penulisan Isu Sepekan.....	12
Gambar 6. Pengecekan Hak Paten dan Hak Cipta Isu Sepekan	13
Gambar 7. Hasil Perbandingan Jawaban Kuesioner untuk Masing-Masing Isu.....	14
Gambar 8. Diagram Sebab-Akibat Isu: Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan)	16
Gambar 9. Pola Penulisan Isu Sepekan.....	19
Gambar 10. Tampilan Awal <i>Web Based</i> Pembuatan Isu Sepekan.....	33
Gambar 11. Halaman <i>Log In</i>	33
Gambar 12. Halaman <i>Log In</i> yang Telah Diisi	34
Gambar 13. <i>Dashboard</i> masing-masing Analis Legislatif.....	34
Gambar 14. Tampilan “Tambah Isu”	35
Gambar 15. Contoh Pengisian Kolom Isu Sepekan.....	37
Gambar 16. Contoh Hasil Pengisian Kolom Isu Sepekan	37
Gambar 17. Hasil PDF Pembuatan Isu Sepekan dengan <i>Web Based</i>	38
Gambar 18. Sosialisasi dan Demo Pembuatan Isu Sepekan dengan <i>Web Based</i>	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3) mengisyaratkan adanya perubahan struktur, baik pada Alat-alat Kelengkapan DPR (AKD) RI maupun perubahan struktur dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen DPR RI sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3 tersebut telah dilaksanakan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK DPR RI). Dalam ketentuan tersebut antara lain dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian.. Sehingga, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah suatu unit kerja yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, namun secara substansif bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut tertuang pada UU MD3 pada Bab III tentang Badan Keahlian, pada pasal 287 hingga pasal 290.

Adapun pada UU MD3 pasal 290 dijelaskan terdapat adanya Badan Keahlian DPR RI. Di dalam Badan Keahlian DPR RI terdapat beberapa pusat, bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Pusaka (Pusat Analisis Keparlemenan) sebagai bagian dari Badan Keahlian dan Setjen DPR RI, dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengacu kepada visi DPR RI yang tertuang dalam Rencana Strategis DPR RI Tahun 2020-2024 yaitu **“Mewujudkan DPR RI yang maju, terbuka dan responsif.”** Untuk mendukung tercapainya visi DPR RI tersebut, Setjen DPR RI sebagai organisasi sistem pendukung melalui visinya bertekad untuk **“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI.”** Guna mencapai visi tersebut selanjutnya dituangkan dalam misi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 yaitu:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Misi menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI, merupakan tanggung jawab dari Badan Keahlian.. Di dalam Badan Keahlian DPR RI terdapat beberapa pusat, bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Pusaka (Pusat Analisis Keparlemenan) menjadi salah satu pusat unit bagian dari Badan Keahlian dan Setjen DPR RI. Kelompok jabatan fungsional di bagian Pusaka terdapat Analis Legislatif dan Analis Kebijakan. Analis Legislatif adalah salah satu bagian dari kelompok jabatan fungsional di Badan Keahlian DPR RI. Jabatan Fungsional Analis Legislatif adalah jabatan fungsional keahlian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. Butir-butir tugas pokok dan fungsi analis legislatif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 11 Tahun 2022 dan Peraturan Sekretaris Jenderal no 6 dan 7 Tahun 2022. Produk-produk yang dihasilkan oleh analis legislatif dalam hal melakukan tupoksinya antara lain Isu Sepekan, Info Singkatl, Buku, *Policy Brief*, *Foreign Legislation Analysis* (FLA), *Parliamentary Review*, dan Jurnal Ilmiah. Berikut ini merupakan produk-produk atau output yang dihasilkan Analis Legislatif.

Gambar 1. Produk-Produk (*Output*) Analis Legislatif



Penyusunan aktualisasi ini berfokus pada penguatan manajemen ASN yang efektif, yang merupakan elemen kunci dalam mencapai kinerja birokrasi yang unggul. Dalam pelatihan ini, CPNS diajarkan untuk memahami pentingnya manajemen ASN yang baik, termasuk dalam hal pengembangan kompetensi, penegakan disiplin, dan pengelolaan karier. Manajemen yang efektif memastikan bahwa setiap ASN, termasuk CPNS, dapat berkontribusi optimal dalam struktur organisasi dan mendukung tugas-tugas Setjen DPR RI. Dengan pemahaman yang baik tentang manajemen ASN, CPNS diharapkan mampu menjalankan perannya dengan lebih baik, menjunjung tinggi profesionalisme, dan mendukung efektivitas organisasi. Aktualisasi ini juga diharapkan mampu menjadikan lompatan instansi atau unit kerja dalam memperbaiki tata kelola dan memberikan dampak berupa kebermanfaatan efisiensi kinerja di lingkungan analis legislatif. Pemanfaatan teknologi informasi *web based* dalam pembuatan Isu Sepekan ini juga diharapkan mampu mempermudah tugas dan fungsi yang menjadi produk *output* analis legislatif ahli pertama dan muda.

1.2. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, terdapat beberapa dasar hukum penyelenggaraan pelatihan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 4 Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

1.3. Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS ini adalah sebagai berikut:

1. Para peserta pelatihan dasar CPNS mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara;
2. Para peserta pelatihan dasar CPNS mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Para peserta pelatihan dasar CPNS mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
4. Para peserta Latihan dasar CPNS mampu menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat pelaksanaan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS ini adalah sebagai berikut:

1. Para peserta pelatihan dasar CPNS pada akhirnya menjadi PNS yang mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK dalam mendukung *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”;

2. Bagi instansi tempat penugasan peserta pelatihan dasar CPNS, aktualisasi ini mendukung visi dan misi instansi tersebut, yang dalam hal ini adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya sebagai “support system” terbaik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

2.1. Visi dan Misi Organisasi

Visi DPR RI:

Mewujudkan DPR RI yang maju, terbuka dan responsif.

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI

Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI.

Visi Badan Keahlian DPR RI:

Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal dan Akuntabel.

Misi Setjen DPR RI:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

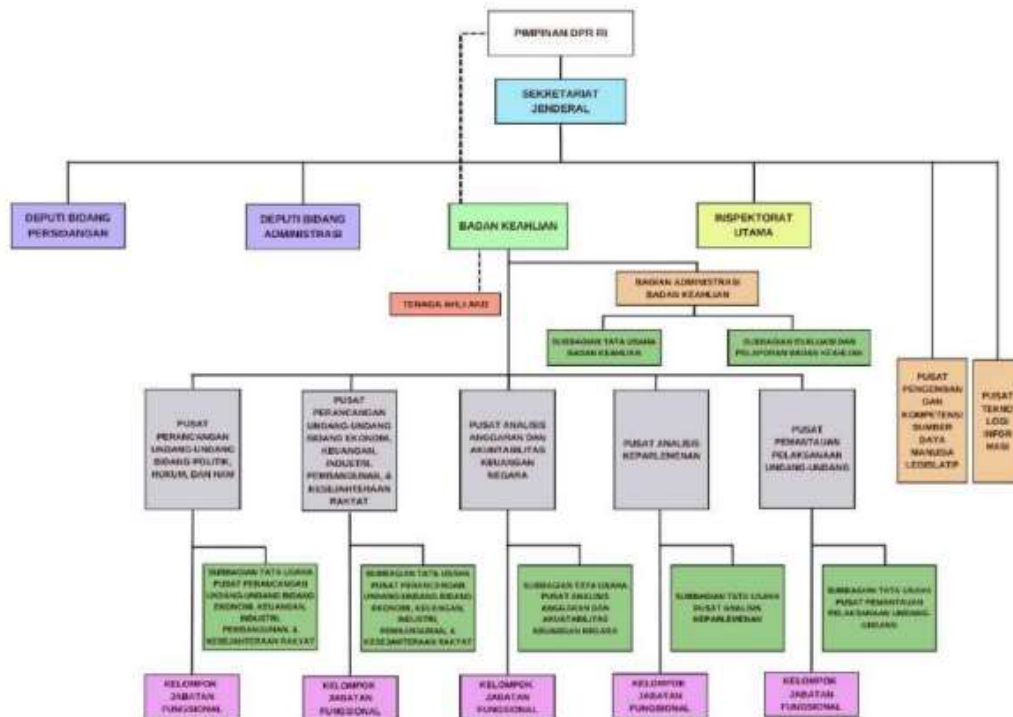
Misi Badan Keahlian DPR RI:

1. Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
2. Menyelenggarakan tata Kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

2.2. Struktur Organisasi

Badan Keahlian memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keahlian



Berdasarkan Pasal 282 Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI disebutkan bahwa BK Setjen DPR RI dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. Kepala Badan Keahlian bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI melalui pelaksanaan dukungan keahlian oleh pusat-pusat yang berada di bawah koordinasinya. Selanjutnya dalam Pasal 285 juga disebutkan bahwa Badan Keahlian terdiri atas;

1. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
2. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
3. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
4. Pusat Analisis Keparlemenan
5. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
6. Bagian Administrasi Badan Keahlian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 pada Bab IV pasal 6 tentang jabatan Fungsional Analis Legislatif, tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif yaitu melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.

Adapun uraian kegiatan Analis Legislatif Ahli Pertama ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
2. Melakukan analisis deskriptif substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
3. Melakukan analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
4. Melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
5. Melakukan analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual;
6. Mengumpulkan dan mengolah data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;
7. Melakukan analisis deskriptif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk ringkasan isu;
8. Menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan ringan;
9. Menelaah substansi dalam prapembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan;
10. Menelaah substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah;
11. Menelaah substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
12. Menelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
13. Menelaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
14. Menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral;
15. Menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral;

16. Menelaah substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
17. Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
18. Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal unit; dan
19. Memaparkan dan/atau membahas hasil analisis deskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

3.1. Identifikasi Isu

Berdasarkan pemaparan di atas, tugas pokok dan fungsi Analis Legislatif adalah analisis, asistensi dan ekspose hasil analisis. Dalam mengumpulkan data dan memunculkan isu-isu aktual yang ada pada Pusat Analisis Keparlemenan, penulis melakukan wawancara kepada analis legislatif senior untuk mendapatkan wawasan terkait apa yang menjadi tugas dan fungsi seorang analis legislatif pertama, penyebaran kuesioner, dan observasi selama sekitar 3 bulan di Pusat Analisis Keparlemenan. Tusi analis legislatif ahli pertama nantinya adalah membuat Isu Sepekan dan Info Singkat. Isu Sepekan dan Info Singkat memiliki format penulisan, redaksi, editor dan layouter. Kewajiban seorang analis legislatif ahli pertama adalah membuat Isu Sepekan, sedangkan untuk Info Singkat, masih ditandemkan dengan analis legislatif senior. Oleh karena itu, penulis akan membuat topik aktualisasi mengenai Isu Sepekan. Berikut ini merupakan bukti wawancara penulis dengan analis legislatif senior untuk memunculkan isu-isu yang ada di dalam Pusat Analisis Legislatif.

Gambar 3. Wawancara dengan Analis Legislatif Senior



Wawancara dilakukan dengan Bapak Teddy Prasetiawan, S.T., M.T. selaku analis legislatif ahli madya, sekaligus bagian layouter Isu Sepekan. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang dibagikan, penulis setidaknya menemukan 3 isu atau permasalahan yang ada di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI terkait Isu Sepekan yang dapat dianalisis. Berikut ini merupakan isu yang ada di unit kerja fungsional analis legislatif terkait Isu Sepekan:

1. Tidak adanya Sumber Daya Manusia Tetap dalam Proses Penerbitan Produk Pusaka Isu Sepekan

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara dan observasi penulis selama bekerja sekitar 3 bulan di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan, tidak ada sumber daya manusia atau administrator pengelola (ASN non-analis legislatif) dalam proses pengelolaan produk-produk Pusaka menjadi sebuah isu sendiri. Dikarenakan selama ini proses pengelolaannya berdasarkan pergantian analis legislatif untuk menjadi penulis, redaksi, editor, dan *layouter*. Pembagian tersebut berulang secara terus menerus atau pergantian (*Person In Charge*) khususnya dalam melaksanakan tugas penulis, redaksi, dan editor memiliki risiko akan perbedaan persepsi bagaimana proses redaksi dan editorial dilakukan karena berbeda orang dalam proses menanganinya. Sementara untuk *layouter* tidak ada pergantian rutin dalam proses pembuatan Isu Sepekan. Selain itu, memungkinkan juga proses tersebut mengalami perbedaan dan kesalahan *outcome* antara satu produk dengan produk lain yang sama dikarenakan personel yang mengerjakan berbeda. Berikut ini merupakan bukti terkait orang-orang yang bergantian menjadi *layouter* dan editor dalam pembuatan Isu Sepekan:

Gambar 4. Contoh Pergantian PIC Penulis, Editor, dan *Layouter* dalam Isu Sepekan

The image shows a document titled "Isu Sepekan" with a subtitle "Bidang Polhukam, Komisi I". The main title is "RENCANA PEMBENTUKAN ANGKATAN SIBER TNI". The author is "Aulia Fitri, Analis Legislatif Ahli Muda, auliafitri@dpr.go.id". The document is dated "2024". The contributors are listed under the heading "Sumber" and include names like Clarke, RA & Knake, R. (Cyber War: The Next Threat To National Security and What To Do About It), New York: Harper Collins Publishers, 2010; Klimburg, Alexander, The Darkening Web: The War for Cyberspace, New York: Penguin Press, 2017; Kompas.com, 4 Juli 2024; kumparan.com, 3 Juli 2024; tempo.co, 3 Juli 2024. The contributors are also listed under the heading "EDITOR" and "LAYOUTER".

Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi I

RENCANA PEMBENTUKAN ANGKATAN SIBER TNI

Aulia Fitri
Analis Legislatif Ahli Muda
auliafitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan
Rencana pembentukan Angkatan Siber Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mengemuka setelah terjadinya perbagian serangan siber di Indonesia, termasuk ransomware server Pusat Data Nasional (PDN). Salah satu serangan ke server PDN berdampak pada data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang diretas dan diperjualbelikan di dark web. Sebelumnya, usulan untuk membentuk Angkatan Siber TNI muncul dari usulan mantan gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Wijayanto, yang menekankan bahwa investasi atau penyerangan ke suatu negara tidak lagi selalu melalui armada perang dan persenjataan, tetapi melalui peperangan siber (cyber warfare).

Markas Besar TNI saat ini masih menyusun pembentukan angkatan keempat yaitu Angkatan Siber. Pembentukan angkatan keempat ini nantinya akan melengkapi tiga matri yang sudah ada di tubuh TNI yakni Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL), dan Angkatan Udara (TNI AU). Indonesia dapat belajar dari pengalaman Singapura yang membentuk angkatan sibernya pada Oktober 2022, yang diperkuat oleh 3.000 prajurit. Pemerintah Singapura menargetkan menambah jumlah pasukan angkatan sibernya sampai 12.000 dalam kurun waktu 8 tahun. Militer Singapura menggunakan seragam hijau untuk angkatan darat, seragam putih untuk angkatan laut, seragam biru angkatan udara, dan abu-abu untuk angkatan digital dan intelijen.

Sumber
Clarke, RA & Knake, R. *Cyber War: The Next Threat To National Security and What To Do About It*, New York: Harper Collins Publishers, 2010;
Klimburg, Alexander, *The Darkening Web: The War for Cyberspace*, New York: Penguin Press, 2017;
kompas.com, 4 Juli 2024;
kumparan.com, 3 Juli 2024;
tempo.co, 3 Juli 2024.

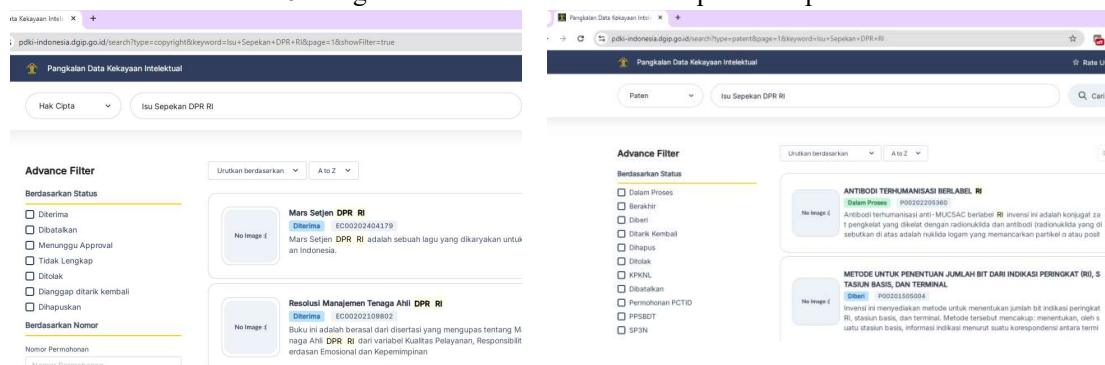
EDITOR
Polhukam
Prayudi
Nawanto H. Hantoro
Ahmad Budiman
Eksuimbang
Sri Nurhayati G.
Sukso Rongiyati
Suhartono
Vani Eka Satrio
Dewi Wuryandani
Kesra
Yulia Indahati
Triana Putraka K.
Luthfi Febrilia Nala

LAYOUTER
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Eksuimbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnoringih
Dewi Sandhikarani D.
Sita Halimah
Nawati Puji S.
Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Mayyitah Aulia A.
Yosephus Manoke
Muhammad Taja
Nur Shalikh P.S.
Fika Nurul A.

2024

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Eksuimbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnoringih
@pusaka.dpr.go.id
@pusaka_bidpri
@PusakaBK2024

Gambar 6. Pengecekan Hak Paten dan Hak Cipta Isu Sepekan



3. Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan).

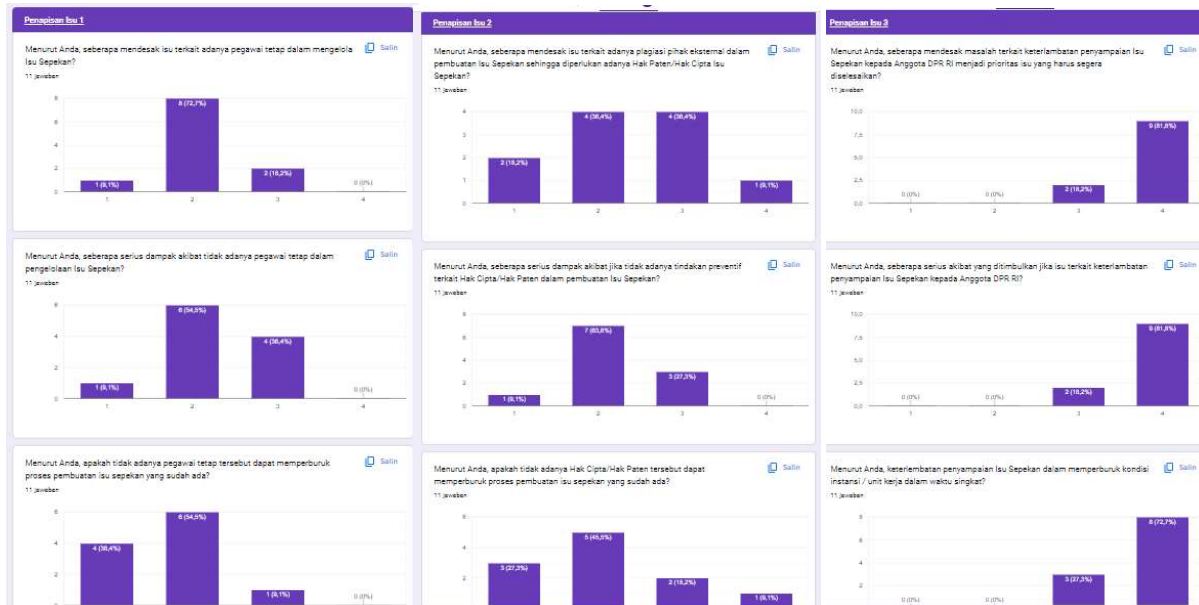
Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner, dan observasi penulis selama bekerja sekitar 3 bulan di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan, adanya keterlambatan dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan pernah terjadi. Hal ini sangat krusial dikarenakan penyampaian Isu Sepekan haruslah tepat waktu dikarenakan terkait relevansi Isu yang dibahas di DPR RI. Hal ini menjadi isu atau permasalahan kritis yang perlu diselesaikan. Permasalahan ini dimungkinkan terjadi akibat adanya pergantian PIC (*Person In Charge*) redaksi dalam rangka pembuatan Isu Sepekan. Hal tersebut memakan banyak waktu sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan. Semestinya Isu Sepekan membahas isu-isu paling baru terkait komisi-komisi yang ada di DPR. Oleh karena itu, Isu Sepekan merupakan produk yang sangat penting untuk dapat dipublikasikan tepat waktu, sehingga keterkinian isu tersebut mampu memberikan *input* substantif yang berguna bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam melaksanakan wewenangannya seperti Pengawasan dengan mitra, pembuatan Undang-Undang maupun dalam membahas anggaran dengan pemerintah.

Permasalahan ini juga didukung oleh analis legislatif senior melalui wawancara yang telah penulis lakukan. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, pembuatan Isu Sepekan ini merupakan produk mingguan pada masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya pergantian PIC (*Person In Charge*) yang mengurus Isu Sepekan dan pembuatan editorial serta redaksi dari internal analis legislatif ini membuat lamanya publikasi Isu Sepekan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pembenahan terkait tata cara penulisan Isu Sepekan yang dapat dilakukan secara lebih efisien dan memudahkan analis legislatif dalam melakukan pembuatan Isu Sepekan tersebut.

3.1.1 Pemilihan Isu Prioritas

Dilakukan penapisan dari 3 isu yang ada di Pusaka. Penapisan isu dilakukan untuk memprioritaskan isu mana yang sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu dikarenakan keterbatasan atau *constraint* sumber daya. Oleh karena itu, isu yang ditapis adalah isu-isu yang terjadi pada unit kerja yang sama dan dalam topik atau tema yang sama. Digunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dalam penapisan isu. Dalam menetapkan nilai pada masing-masing isu, dilakukan survei kepada analis legislatif yang pernah terlibat dalam pembuatan Isu Sepekan. Berikut hasil kuesioner:

Gambar 7. Hasil Perbandingan Jawaban Kuesioner untuk masing-masing Isu



Berikut penggunaan USG dalam penapisan isu untuk penentuan *core* isu berdasarkan hasil survey:

Tabel 1. Penapisan Isu Instansi/Unit Kerja

No.	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai	Peringkat Kualitas
		U	S	G		
1.	Tidak adanya Sumber Daya Manusia Tetap dalam Pengelolaan Produk-Produk Pusaka seperti Isu Sepekan.	3	3	2	8	3
2.	Tidak Adanya Hak Paten dan Hak Cipta pada Produk-Produk Pusaka.	3	5	5	13	2
3.	Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan)	5	5	5	15	1

Berdasarkan hasil penapisan isu menggunakan metode USG pada Tabel 1 diperoleh bahwa dari tiga isu yang sudah dibahas di atas, isu terkait tidak adanya Sumber Daya Manusia Tetap dalam Pengelolaan Produk-Produk Pusaka seperti Isu Sepekan menjadi isu dengan prioritas ketiga untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan kekurangan pegawai tetap bukanlah menjadi hal yang *urgent* dan serius untuk segera diselesaikan. Terdapat cukup banyak analis legislatif dan pegawai TU atau terdapat lebih dari 100 pegawai *existing* di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan yang sebenarnya bisa diberdayakan. Oleh karena itu, tingkat *urgency* dan *seriousness* terkait isu tidak adanya Sumber Daya Manusia Tetap dalam Pengelolaan Produk-Produk Pusaka seperti Isu Sepekan mendapatkan nilai 3 poin yang artinya Cukup Mendesak untuk segera ditangani dan memiliki pengaruh pada unit kerja. Indikator *Growth* terkait isu tidak adanya Sumber Daya Manusia Tetap dalam Pengelolaan Produk-Produk Pusaka seperti Isu Sepekan, memperoleh nilai 2 poin, hal tersebut mengindikasikan bahwa kecenderungan isu ini tidak akan cepat memburuk dalam waktu 1 tahun, dikarenakan adanya SDM non pengelola yang sebenarnya dapat diberdayakan untuk mengelola isu ini. Namun, perlu adanya perbaikan di masa mendatang agar unit kerja dapat berjalan lebih adaptif dan profesional karena terdapat SDM yang benar-benar sesuai bidang dan kualifikasinya.

Kedua, isu terkait tidak Adanya Hak Paten dan Hak Cipta pada Produk-Produk Pusaka, menempati posisi kedua dengan total nilai 13. Pertama, nilai *urgency* mendapatkan 3 poin. Hal ini dikarenakan produk-produk Pusaka DPR RI hanya dikeluarkan melalui kanal-kanal resmi seperti *website* Pusaka dan akun sosial media resmi Pusaka. Oleh karena itu, apabila ada pemalsuan atau plagiasi terkait produk Pusaka yang dikeluarkan selain melalui kanal-kanal tersebut, dapat dijadikan indikator kuat bahwa produk tersebut palsu. Oleh karena itu, *urgency* penyelesaian masalah ini terbilang netral, sehingga mendapat 3 poin. Kemudian dalam hal *Seriousness* dan *Growth*, memperoleh 5 poin. Dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan ataupun plagiasi produk Pusaka ini berdampak pada banyak pihak apabila tidak segera tertangani dengan baik. Selain itu, adanya misinformasi yang diberikan apabila isu ini tidak segera ditangani juga menjadikannya mendapat 5 poin. Oleh karena itu, perlu tindakan konstruktif ke depan dalam melakukan pematenan terkait produk Pusaka agar memiliki *legal standing* yang lebih kuat di masa mendatang.

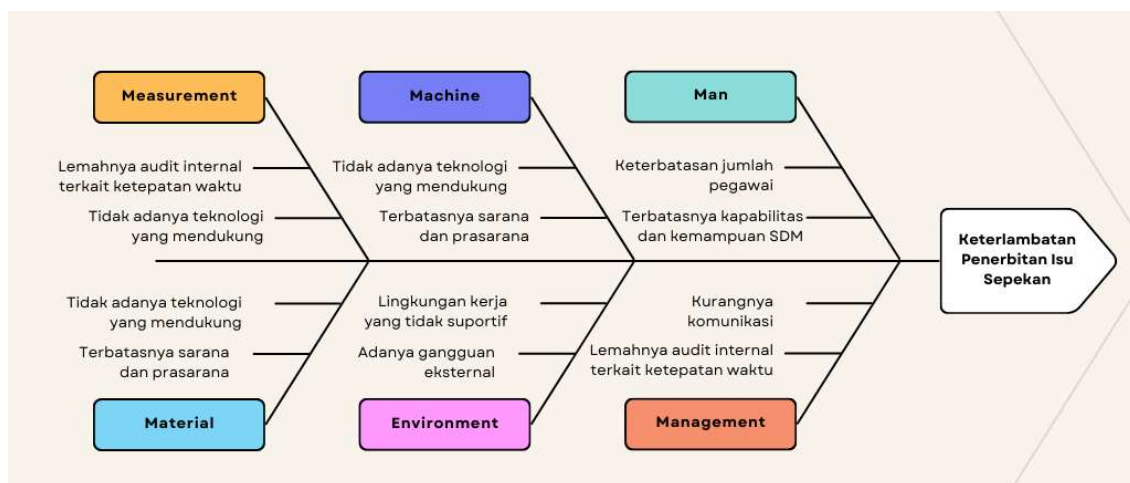
Ketiga, isu **ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan)** menjadi prioritas utama yang memperoleh nilai 15. Dilihat dari perspektif *urgency*, isu ini menjadi sangat mendesak untuk diselesaikan karena berhubungan langsung dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat selaku user substantif analis legislatif. Isu sepekan dapat mendukung proses legislasi, anggaran, maupun pengawasan dengan mitra DPR. Oleh karena itu, keterlambatan dalam publikasi dapat memengaruhi relevansi isu-isu terkini yang sedang dibahas juga menunjukkan ketidakprofesionalisme unit kerja dalam mendukung fungsi anggota dewan. Dilihat dari sisi *seriousness*, isu ini juga sangat serius untuk segera diselesaikan, karena terdapat banyak pihak didalamnya yang terkait, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku

pengguna dan juga masyarakat serta stakeholder yang berhubungan seperti mitra Komisi di DPR. Hal ini juga memengaruhi citra Pusat Analisis Keparlemenan di mata anggota dewan, masyarakat dan mitra DPR RI. Oleh karena itu, penyelesaian isu terkait ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan) mendapat 5 poin dalam hal seriousness. Kemudian, terkait Growth, keterlambatan penerbitan Isu Sepekan mengakibatkan hilangnya relevansi dan keterbaruan isu untuk dibahas di DPR. Hal ini bisa saja sangat cepat memburuk dikarenakan isu-isu yang dibahas adalah isu-isu faktual yang sedang terjadi di masyarakat maupun kementerian atau lembaga lain. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan cepat untuk segera mengatasi isu ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan) agar keterpurukan dampak dari isu tersebut dapat diredam. Berdasarkan analisis USG, ditetapkan core isu yang akan dibahas dalam aktualisasi penulis adalah ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan) dengan nilai USG 15 poin.

3.2. Analisis Isu

Setelah dilakukan penetapan *core* isu, langkah selanjutnya adalah menentukan sebab-akibat dari *core* isu terpilih. Core isu yang dibahas adalah ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan). Selanjutnya digunakan metode analisis diagram sebab-akibat untuk menentukan penyebab dari *core* isu terpilih. Berikut ini merupakan analisis sebab-akibat dengan menggunakan diagram *fishbone* terkait isu ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan):

Gambar 8. Diagram Sebab-Akibat Isu: Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan)



Berdasarkan diagram *fishbone* atau diagram sebab akibat pada Gambar 8, diperoleh bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu

Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan). Dilihat dari sisi *Man* atau Sumber Daya Manusia, terdapat 2 faktor sebab keterlambatan penerbitan isu sepekan, yaitu adanya keterbatasan jumlah SDM dan terbatasnya kapabilitas dan kemampuan SDM dalam mengelola penerbitan Isu Sepekan. Kemudian, dilihat dari sisi *Management* atau Tata kelola, faktor kurangnya komunikasi dan lemahnya audit internal terkait ketepatan waktu penerbitan Isu Sepekan menjadi akar penyebabnya. Faktor *Machine* atau Peralatan, terdapat faktor tidak adanya teknologi yang mendukung dalam proses penerbitan Isu Sepekan secara tepat waktu dan terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan menjadi penyebab ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan). Dilihat dari sisi *Environment* atau Lingkungan kerja, diperoleh bahwa lingkungan kerja yang tidak mendukung dan terdapat adanya gangguan eksternal yang dialami analis legislatif maupun PIC yang bertanggung jawab dalam Isu Sepekan menjadi faktor kunci keterlambatan penerbitan Isu Sepekan. Kemudian, faktor *Measurement* atau Pengukuran kinerja, faktor-faktor seperti lemahnya audit internal terkait ketepatan waktu dan tidak adanya teknologi yang mendukung menjadi faktor kunci penyebab terjadinya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan. Faktor *Material* atau materi, tidak adanya teknologi yang mendukung dan terbatasnya sarana dan prasana menjadi faktor utama penyebab ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan).

Berdasarkan analisis *fishbone* pada Gambar 8, diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas faktor penyebab terjadinya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan terletak pada tidak adanya teknologi yang mendukung menjadi faktor penyebab utama. Faktor ini muncul sebanyak 3 kali pada bagian *Machine*, *Material*, dan *Measurement*. Faktor lain seperti lemahnya audit internal terkait ketepatan waktu dalam hal penerbitan Isu Sepekan dan terbatasnya sarana dan prasarana, menempati posisi kedua paling banyak muncul atau muncul sebanyak 2 kali pada diagram *Fishbone Analysis*. Sementara faktor-faktor penyebab lain hanya muncul 1 kali pada diagram sebab-akibat. Oleh karena itu, berdasarkan faktor penyebab yang paling banyak muncul, yaitu **tidak adanya teknologi yang mendukung** menjadi faktor penyebab utama yang harus diselesaikan.

3.3. Gagasan Pemecahan Isu

Isu utama atau *core* isu yang dibahas pada aktualisasi ini adalah ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan) dengan penyebab utama tidak adanya teknologi yang mendukung terkait pembuatan Isu Sepekan. Berdasarkan hal tersebut dibuat analisis menggunakan teknik APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) terkait pemilihan strategi apa yang cocok diterapkan untuk mengatasi keterlambatan Isu Sepekan dengan penyebab utama tidak adanya teknologi yang mendukung. Berikut ini merupakan pemilihan strategi gagasan kreatif menggunakan teknik APKL:

Tabel 2. Pemilihan Gagasan Kreatif

Strategi Gagasan Kreatif	A	P	K	L	Jumlah	Prioritas
Penambahan SDM sesuai kualifikasi dan kompetensi teknologi yang sesuai	1	2	2	3	8	3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembuatan Isu Sepekan (Automasi Proses Editorial)	4	5	3	5	17	1
Kerja sama dengan pihak ketiga terkait teknologi dalam pengelolaan Isu Sepekan	2	1	3	1	7	4
Pelatihan Teknologi Informasi terkait pembuatan Isu Sepekan dengan penggunaan AI	4	3	3	3	13	2

Berdasarkan hasil pemilihan gagasan kreatif dengan menggunakan teknik APKL pada Tabel 2, diperoleh bahwa dari empat rekomendasi gagasan kreatif untuk mengatasi isu ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan) dengan penyebab utama tidak adanya teknologi yang mendukung terkait pembuatan dan penerbitan Isu Sepekan, gagasan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembuatan Isu Sepekan (Automasi Proses Editorial) menjadi prioritas pertama untuk bisa diimplementasikan. Sedangkan gagasan lain seperti Pelatihan Teknologi Informasi terkait pembuatan Isu Sepekan dengan penggunaan AI menempati prioritas kedua. Gagasan tentang penambahan SDM sesuai kualifikasi dan kompetensi teknologi yang sesuai menjadi prioritas ketiga. Sedangkan kerja sama dengan pihak ketiga terkait teknologi dalam pengelolaan Isu Sepekan menjadi prioritas keempat. Oleh karena itu, dalam rancangan Aktualisasi ini akan dilakukan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembuatan Isu Sepekan (Automasi Proses Editorial) sebagai gagasan kreatif yang akan dilaksanakan untuk mengatasi isu ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan) dengan penyebab utama tidak adanya teknologi yang mendukung terkait pembuatan dan penerbitan Isu Sepekan.

Penetapan core isu terkait ketidaktepatan waktu dalam penerbitan Isu Sepekan ini dinilai juga dari beberapa aspek lain seperti dengan memperhatikan kebermanfaatan akan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pembuatan Isu Sepekan. Kebermanfaatan dengan proses pembuatan Isu Sepekan yang lebih ringkas mampu menghasilkan produk Isu Sepekan yang lebih berfokus pada substansi penulisan. Hal ini dikarenakan pemanfaatan waktu yang diberikan bisa dioptimalkan untuk fokus dalam proses pembuatan substansi konten produk daripada memikirkan mempergunakan waktu yang ada untuk proses editorial (layouting). Hal ini juga dapat mempermudah analisis legislatif dalam membuat Isu Sepekan yang lebih cepat dan ringkas.

Gagasan kreatif terkait implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembuatan Isu Sepekan (Automasi Proses Editorial) dapat dilakukan dengan menggunakan *Web Based* sebagai sistem kontrol. Automasi proses editorial dapat dilakukan dengan menggunggah data-data yang diperlukan dan *layout* Isu Sepekan dalam pembuatannya. Sistem kontrol yang dapat dilakukan Web based berupa jumlah kata, jumlah halaman, dan tipografi. Sistem kontrol ini diharapkan dapat menjadikan proses editorial dan redaksi Isu Sepekan menjadi lebih singkat. Oleh karena itu, diharapkan waktu proses yang jauh lebih singkat dan efisien ini mampu memberikan kontribusi berupa ketepatan waktu dalam hal publikasi atau penerbitan Isu Sepekan.

Gambar 9. Pola Penulisan Isu Sepekan



Berdasarkan Gambar 9, dapat dijelaskan bahwa produk analisis legislatif Isu Sepekan itu memiliki pola atau *pattern* dalam pembuatannya. Misalkan saja uraian isu tersebut memiliki sekitar kurang lebih 600-650 kata (kotak merah) dengan kolom pada atensi DPR memiliki kurang lebih 100 kata (kotak hijau). Selain itu, juga dapat dilihat penataan paragraf yang sedemikian rupa sehingga dapat ditampilkan tampilan produk analisis legislatif yang menarik untuk dibaca. Terdapat 6 aspek yang ada pada setiap Isu Sepekan, yaitu:

1. Judul Isu Sepekan
2. Nama Penulis
3. Periode Isu Sepekan dan Bidang
4. Uraian Isu dan Permasalahan
5. Atensi DPR
6. Sumber

Keterkaitan inovasi yang penulis lakukan berkenaan dengan persidangan DPR adalah inovasi penggunaan teknologi informasi ini mampu meringkas waktu pengerjaan Isu Sepekan yang siap didistribusikan kepada anggota dewan sebagai feeding atau bahan substansi pada rapat-rapat yang ada di DPR, seperti rapat komisi, rapat kerja, rapat panitia khusus, dan lain sebagainya dengan lebih cepat karena melewati proses editorial yang menggunakan TI. Selain itu, kebermanfaatan penggunaan TI untuk pembuatan Isu Sepekan ini juga dapat memberikan dampak pada hasil substansi analisis yang lebih mendalam dikarenakan fokus pengerjaannya akan lebih berfokus untuk penulis menulis isi konten Isu Sepekan daripada proses editorial. Perubahan kecil dengan melakukan pemanfaatan IT dalam proses berkinerja di Pusat Analisis Keparlemenan mendorong percepatan masa transisi menuju parlemen modern yang diharapkan sesuai dengan visi DPR. Selain itu, hal ini adalah bagian dari pengamalan core values ASN BerAKHLAK khususnya dalam hal Berorientasi Pelayanan, Kompeten, dan Adaptif. Berorientasi pelayanan karena berorientasi untuk memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anggota DPR. Selain itu menunjukkan penyelesaian Isu Sepekan yang cekatan, solutif dan dapat diandalkan yang merupakan bagian dari perbaikan tiada henti. Kompeten, peningkatan efisiensi pembuatan Isu Sepekan adalah bagian terus mengembangkan kompetensi dan kapabilitas analisis legislatif dalam hal teknologi. Adaptif, selalu berusaha beradaptasi dengan perkembangan zaman dan terus melakukan inovasi untuk memudahkan pekerjaan analisis legislatif.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan *web based* nantinya akan dapat dijadikan sistem kontrol dengan mendeteksi apakah tulisan tersebut sudah dalam kata-kata yang diperbolehkan dan halaman yang sesuai. Kemudian juga dapat meninjau tipografi secara instan. Sistem kontrol akan memberikan notifikasi, apabila terjadi kesalahan penulisan kata, maupun jumlah kata yang kurang atau melebihi batas yang diperbolehkan. Adanya automasi proses editorial ini menjadi terobosan untuk memudahkan analisis legislatif dalam membuat Isu Sepekan. Selain itu, hal ini juga dapat mengatasi masalah terkait adanya pergantian PIC (*Person In Charge*) yang mengelola Isu Sepekan secara bergantian. Pengembangan dengan sistem teknologi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah berupa efisiensi waktu dan tenaga dalam pembuatan Isu Sepekan. Hal ini juga mendorong adanya perubahan SMART ASN dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan dan menunjang kinerja. Automasi proses editorial dalam pembuatan Isu Sepekan ini juga merupakan kontribusi dengan mengamalkan nilai-nilai BerAKHLAK ASN. Oleh karena itu, pengembangan inovasi ini diharapkan mampu memberikan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) bagi unit kerja dan instansi.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

4.1. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan (PUSAKA)

Identifikasi Isu :

1. Tidak adanya Sumber Daya Manusia Tetap dalam Proses Penerbitan Produk Pusaka Isu Sepekan
2. Tidak Adanya Hak Paten dan Hak Cipta pada Isu Sepekan.
3. Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan)

Isu yang Diangkat : Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan)

Penyebab Utama : Tidak adanya teknologi yang mendukung terkait pembuatan Isu Sepekan

Gagasan Pemecahan Isu : Pemanfaatan Teknologi Informasi *Web Based* dalam Pembuatan Isu Sepekan

Tabel 3. Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III	Kontribusi Terhadap Tusi/ Visi Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Menentukan isu-isu yang ada di dalam instansi / unit kerja	1.1 Melakukan observasi di instansi / unit kerja untuk menemukan konsep isu-isu yang ada di dalam unit kerja 1.2 Berdiskusi dengan senior terkait isu-isu apa yang ada di dalam unit kerja 1.3 Konsultasi dengan <i>coach</i> dan mentor terkait isu-isu relevan yang akan dibahas	1.1 Konsep isu-isu yang ada pada unit kerja 1.2 Konsep terkait ide, pemahaman, <i>insight</i> dan data terkait isu-isu yang akan dibahas 1.3 Konsep rancangan penulisan dengan pentapan isu-isu yang relevan dengan pembahasan (memunculkan isu-isu terkait tata kelola Isu Sepekan)	1.1 Berorientasi Pelayanan: Kegiatan ini sesuai dengan semangat ASN untuk melakukan perbaikan tiada henti. 1.2 Akuntabel: Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi. 1.3 Kompeten: Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan capaian aktualisasi terbaik dengan memilih isu yang paling prioritas untuk diselesaikan. 1.4 Harmonis: Kegiatan ini dilakukan dengan mengedepankan menjalin keharmonisan di lingkungan kerja, oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan dengan diskusi penulis, mentor, coach dan narasumber yang	Kegiatan ini mendukung manajemen ASN dan SMART ASN dimana penulis melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor, <i>coach</i> , dan analis legislatif senior untuk melakukan pengembangan diri dan menggunakan media teknologi informasi sebagai bagian dari inovasi gagasan kreatif yang akan dilakukan dalam aktualisasi penulis.	Kegiatan ini mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI.” Hal ini dapat dilihat dari bagaimana isu-isu yang diangkat juga memperhatikan terkait permasalahan penggunaan teknologi agar modernisasi dan profesionalisme Setjen dapat ditingkatkan demi mendukung Visi Setjen DPR RI.

				dilakukan dengan menghargai pendapat masing-masing. 1.5 Loyal: Kegiatan ini dilakukan untuk pelaksanaan aktualisasi demi kepentingan instansi, bangsa dan negara. 1.6 Adaptif: Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan inovasi perbaikan dengan menggunakan teknologi informasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 1.7 Kolaboratif: Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi dari analis senior selaku mentor, widyaiswara selaku <i>coach</i> dan CPNS selaku penulis.		
2.	Mengumpulkan referensi dan literatur pendukung terkait rancangan gagasan kreatif	2.1 Melakukan konsultasi dengan <i>coach</i> dan mentor terkait penulisan rancangan gagasan kreatif 2.2 Melakukan pencarian terkait data-	2.1 Saran dan masukan baik dari <i>coach</i> maupun dari mentor 2.2 Literatur buku maupun data-data dari pengumpulan data baik primer dan sekunder	2.1 Berorientasi Pelayanan: Penulis melakukan pemilihan referensi dan literatur dengan kualitas terbaik untuk disajikan dalam pelatihan / aktualisasi. 2.2 Akuntabel: Penulis memilah dan memilih literatur yang kredibel dan dapat dipercaya.	Kegiatan ini juga menerapkan nilai manajemen ASN dan SMART ASN dimana penulis melakukan pengembangan untuk unit organisasi dengan data-data referensi, pendapat dan literatur yang kredibel dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pengumpulan data,	Kegiatan ini mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI.” Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pengumpulan referensi, pendapat, dan literatur yang digunakan juga memperhatikan penggunaan teknologi

		data dan fakta <i>core</i> isu yang akan dibahas serta bagaimana gagasan kreatif dapat diimplementasikan 2.3 Melaporkan hasil penentuan <i>core</i> isu kepada mentor dan <i>coach</i>	2.3 Laporan konsep rancangan penulisan dengan penetapan <i>core</i> isu (tertulis maupun lisan)	2.3 Kompeten: Penulis merupakan lulusan magister teknik industri yang tentunya memiliki kualifikasi dan keahlian dalam hal perbaikan dan pengembangan sistem. 2.4 Harmonis: Penggabungan berbagai macam pendapat, referensi dan literatur yang dijadikan bukti, argumen, dan data pendukung terkait aktualisasi. 2.5 Loyal: Penulisan aktualisasi yang dilakukan penulis, penulis tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun demi kepentingan organisasi. 2.6 Adaptif: Penulis mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi guna mencapai visi Setjen DPR RI sebagai <i>supporting system</i> DPR RI untuk menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan modern. 2.7 Kolaboratif: Penulis mengumpulkan referensi dan literatur pendukung dengan kerja sama berbagai pihak.	referensi, dan literatur terbaru tersebut.	agar modernisasi dan profesionalisme Setjen dapat ditingkatkan demi mendukung Visi Setjen DPR RI..
--	--	--	--	---	---	---

3.	Melakukan rancangan gagasan kreatif aktualisasi yang sudah dibuat	3.1 Melakukan inisiasi pembuatan rancangan aktualisasi gagasan kreatif yang telah disetujui 3.2 Membuat petunjuk teknis penggunaan <i>web based</i> dalam pembuatan Isu Sepekan 3.3 Melakukan uji coba penggunaan <i>web based</i> dalam pembuatan Isu Sepekan 3.4 Melakukan konsultasi dengan <i>coach</i> dan mentor terkait hasil inisiasi gagasan kreatif yang sudah dilakukan.	3.1 <i>Prototype web based</i> hasil inisiasi pemanfaatan teknologi untuk automasi proses editorial 3.2 Petunjuk teknis penggunaan <i>web based</i> dalam pembuatan Isu Sepekan. 3.3 Hasil uji coba berupa data dan video tutorial pembuatan isu sepekan melaalui <i>web based</i>. 3.4 sukan dan saran dari <i>coach</i> dan mentor.	3.1 Berorientasi Pelayanan: Penulis melakukan pembuatan <i>prototype</i> automasi proses editorial isu sepekan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa <i>web based</i>. Hal ini diharapkan dapat mendukung proses kinerja analisis legislatif pertama dalam pembuatan Isu Sepekan. Semangat dari pelaksanaan proses ini adalah perbaikan tiada henti. 3.2 Akuntabel: Penulis membuat tugas inovasi ini dengan semangat kejujuran, bertanggung jawab, cermat, disiplin, teliti, dan berintegritas tinggi. 3.3 Kompeten: Hasil dari inovasi gagasan kreatif yang penulis lakukan adalah bentuk dari melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal itu juga tercermin dari bagaimana adanya perbaikan atau input dari <i>coach</i> dan mentor terkait perbaikan inovasi penulis. 3.4 Harmonis: Penulis menghargai setiap pendapat dan masukan dari mentor melalui diskusi dan konsultasi yang dilakukan.	Kegiatan ini juga menerapkan nilai manajemen ASN dan SMART ASN dimana penulis melakukan pengembangan berupa inovasi gagasan kreatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi menggunakan <i>web based</i> yang dapat memudahkan analisis legislatif ahli pertama maupun analisis legislatif ahli muda untuk membuat Isu Sepekan. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan TI ini mampu memudahkan analisis legislatif dalam pembuatan Isu Sepekan dan meningkatkan profesionalisme Setjen DPR RI di mata Dewan Perwakilan Rakyat dengan menghadirkan Isu Sepekan yang tepat waktu dan Setjen DPR RI yang modern dengan optimasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memudahkan pembuatan produk-	Kegiatan ini mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI.” Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pembuatan rancangan aktualisasi yaitu adalah pemanfaatan teknologi Informasi berupa <i>web based</i> agar produk Isu Sepekan Pusaka tidak lagi terlambat dalam penerbitannya karena pembuatannya yang dimudahkan melalui teknologi. Selain itu juga menunjukkan bahwa transformasi Setjen DPR RI menjadi Setjen yang modern terlihat dari rancangan inovasi aktualisasi ini. Sehingga penggunaan teknologi agar modernisasi dan profesionalisme Setjen dapat menjadi bukti bahwa implementasi rancangan aktualisasi ini mendukung Visi Setjen DPR RI.
----	---	---	---	---	--	---

		3.5 Melakukan perbaikan berdasarkan <i>input</i> dari <i>coach</i> dan mentor terhadap hasil inisiasi rancangan gagasan kreatif 3.6 Melaporkan dan mendiskusikan hasil perbaikan dan penulisan aktualisasi kepada mentor dan <i>coach</i>	3.5 Hasil <i>prototype web based</i> yang lebih baik berdasarkan <i>input</i> dari <i>coach</i> dan mentor 3.6 Laporan hasil perbaikan berupa tulisan maupun <i>prototype</i> yang sudah diperbaiki	3.5 Loyal: Pembuatan inovasi aktualisasi, penulis tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun demi kepentingan organisasi, bangsa, dan negara. 3.6 Adaptif: Penulis mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi guna mencapai visi Setjen DPR RI sebagai <i>supporting system</i> DPR RI untuk menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan modern. Inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi adalah bentuk inovasi dan pengembangan kreativitas demi terciptanya Setjen DPR yang profesional dan modern serta mendukung visi DPR RI 3.7 Kolaboratif: Adanya pelibatan banyak pihak, berupa masukan, pembuatan, dan perbaikan inovasi rancangan aktualisasi penulis merupakan bentuk komitmen penulis dalam hal nilai kolaboratif.	produk Pusaka.	
--	--	---	---	---	-----------------------	--

4.	Pembimbing an akhir dan sosialisasi akhir	4.1 Melakukan konsultasi dengan <i>coach</i> dan mentor terkait finalisasi baik secara teknis maupun substansi penulisan aktualisasi 4.2 Melakukan diskusi dengan senior terkait keberlanjutan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan isu sepekan (automasi proses editorial) 4.3 Melakukan sosialisasi atau demo terkait penggunaan teknologi informasi <i>web based</i> dalam pembuatan isu	4.1 Saran dan masukan akhir 4.2 Saran dan masukan akhir untuk bisa dikembangkan di masa mendatang 4.3 Laporan hasil sosialisasi atau demo terkait penggunaan <i>web based</i> untuk Isu Sepekan 4.4 Produk IT <i>web based</i> dalam pembuatan Isu Sepekan dan Laporan aktualisasi hasil kegiatan	4.1 Berorientasi Pelayanan: Kegiatan ini memberikan dampak untuk meningkatkan pelayanan kepada <i>user</i> analis legislatif, yaitu anggota dewan dengan memberikan Isu Sepekan yang tepat waktu. Kegiatan pembimbingan akhir dan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan keseluruhan kepada anggota DPR melalui <i>output</i> Isu Sepekan masing-masing analis legislatif. 4.2 Akuntabel: Penulis membuat tugas inovasi ini dengan semangat kejujuran, bertanggung jawab, cermat, disiplin, teliti, dan berintegritas tinggi. 4.3 Kompeten: Adanya pembimbingan akhir dan sosialisasi dengan pemberian <i>feedback</i> atau umpan balik adalah bentuk kemauan untuk meningkatkan kompetensi diri demi menjawab tantangan yang selalu berubah. 4.4 Harmonis: Penulis membangun suatu metode kerja baru dengan harmonis melalui sosialisasi kepada analis legislatif ahli pertama dan ahli muda yang menjadi tugas dan fungsi untuk	Kegiatan ini juga menerapkan nilai manajemen ASN dan SMART ASN dimana penulis melakukan pengembangan berupa inovasi gagasan kreatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi menggunakan <i>web based</i> yang dapat memudahkan analis legislatif ahli pertama maupun analis legislatif ahli muda untuk membuat Isu Sepekan yang lebih efisien. Diharapkan dengan adanya pembimbingan akhir dan sosialisasi ini, mampu memberikan kesamaan pemahaman terkait bagaimana mengoperasikan teknis pembuatan Isu Sepekan dengan program baru tersebut dan meningkatkan kinerja analis legislatif.	Kegiatan ini mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI.” Hal ini dapat dilihat dari bagaimana implementasi pemanfaatan teknologi tersebut diterapkan melalui petunjuk teknis pembuatan Isu Sepekan. Selain itu, diharapkan semua analis legislatif nantinya akan memiliki kesepahaman yang sama terkait teknis pembuatan Isu Sepekan melalui programbaru tersebut. Kemudian, pembimbingan akhir ditujukan untuk menyempurnakan penulisan aktualisasi agar tercapainya tulisan laporan aktualisasi yang runut, baik dan sistematis. Ketercapaian hal tersebut mampu memberikan pengetahuan baru terkait tata cara pembuatan Isu Sepekan yang lebih mudah secara teknis. Hal
----	--	--	---	--	---	--

		sepekan (automasi proses editorial)		membuat Isu Sepekan. 4.5 Loyal: Pembuatan inovasi aktualisasi adalah bentuk dedikasi penulis untuk memberikan yang terbaik bagi instansi, bangsa dan negara. 4.6 Adaptif: Pembuatan inovasi aktualisasi yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi adalah bentuk adaptasi yang disempurnakan melalui pembimbingan akhir hingga sosialisasi program baru tersebut. 4.7 Kolaboratif: Adanya pelibatan banyak pihak, hingga proses pembimbingan akhir dan sosialisasi berupa masukan, pembuatan, dan perbaikan inovasi rancangan aktualisasi penulis merupakan bentuk komitmen penulis dalam hal nilai kolaboratif.		ini tentu dapat membantu meringankan tugas pokok dan fungsi analis legislatif ahli pertama dan ahli muda.
--	--	-------------------------------------	--	---	--	--

4.2. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 4. Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Menentukan isu-isu yang ada di dalam instansi / unit kerja												
	a) Melakukan observasi di instansi / unit kerja untuk menemukan konsep isu-isu yang ada di dalam unit kerja												
	b) Berdiskusi dengan senior terkait isu-isu apa yang ada di dalam unit kerja.												
	c) Konsultasi dengan coach dan mentor terkait isu-isu relevan yang akan dibahas.												
2	Mengumpulkan referensi dan literatur pendukung terkait rancangan gagasan kreatif.												
	a) Melakukan konsultasi dengan coach dan mentor terkait penulisan rancangan gagasan kreatif.												
	b) Melakukan pencarian terkait data-data dan fakta core isu yang akan dibahas serta bagaimana gagasan kreatif dapat diimplementasikan.												
	c) Melaporkan hasil penentuan core isu kepada mentor dan coach.												

3	Melakukan rancangan gagasan kreatif aktualisasi yang sudah dibuat .											
	a) Melakukan inisiasi pembuatan rancangan aktualisasi gagasan kreatif yang telah disetujui											
	b) Membuat petunjuk teknis penggunaan web based dalam pembuatan Isu Sepekan.											
	c) Melakukan uji coba penggunaan web based dalam pembuatan Isu Sepekan											
	d) Melakukan konsultasi dengan coach dan mentor terkait hasil inisiasi gagasan kreatif yang sudah dilakukan.											
	e) Melakukan perbaikan berdasarkan input dari coach dan mentor terhadap hasil inisiasi rancangan gagasan kreatif											
	f) Melaporkan dan mendiskusikan hasil perbaikan dan penulisan aktualisasi kepada mentor dan coach											
4	Pembimbingan akhir dan sosialisasi akhir											
	a) Melakukan konsultasi dengan coach dan mentor terkait finalisasi baik secara teknis maupun substansi penulisan aktualisasi											

	b) Melakukan diskusi dengan senior terkait keberlanjutan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan isu sepekan (automasi proses editorial)											
	c) Melakukan sosialisasi atau demo terkait penggunaan teknologi informasi web based dalam pembuatan isu sepekan (automasi proses editorial)											
	d) Melaporkan hasil kegiatan pada mentor, coach, dan koordinator bidang											

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

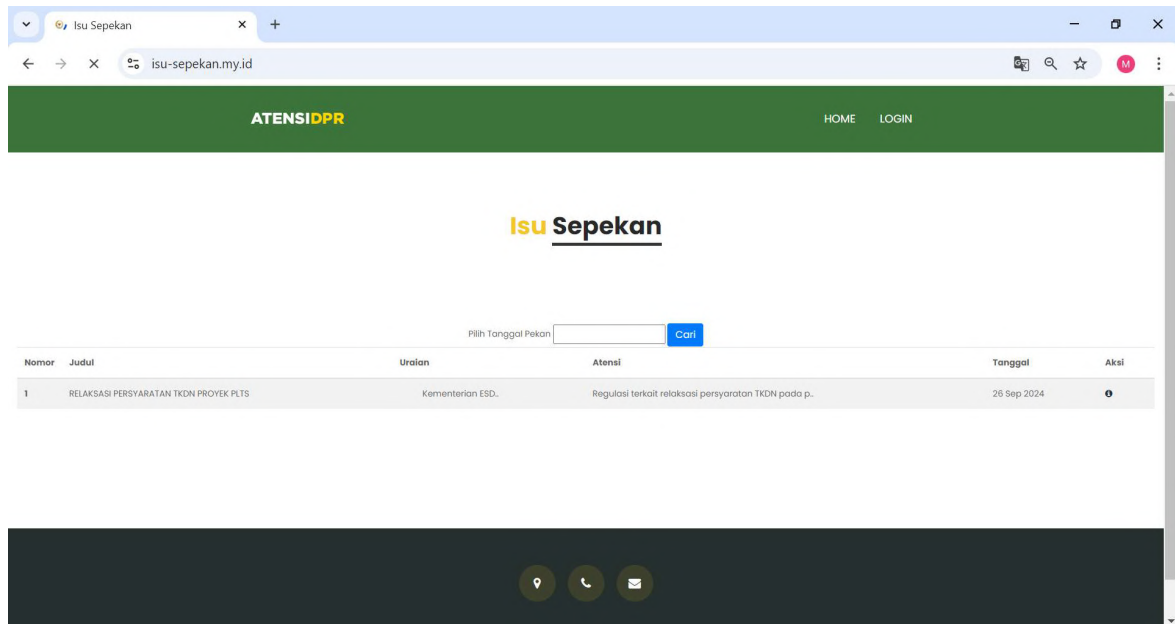
5.1. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

- Jadwal minggu pertama (hingga 28 Agustus 2024):
 - a. Konsultasi dengan *coach* dan mentor terkait masalah-masalah yang ada di dalam unit kerja.
 - b. Melakukan pencarian data-data dan fakta *core issue* yang nantinya akan dibahas dalam Aktualisasi.
 - c. Melakukan pelaporan awal terkait Rancangan Aktualisasi kepada Mentor dan *Coach*.
- Jadwal minggu kedua (hingga 6 September 2024):
 - a. Melakukan inisiasi pembuatan Rancangan Aktualisasi yang telah disetujui.
 - b. Membuat petunjuk teknis penggunaan *web based* dalam pembuatan Isu Sepekan.
 - c. Membuat inisiasi *website dummy* dengan lama *hosting web* selama 3 bulan.
- Jadwal minggu ketiga (hingga 17 September 2024):
 - a. Melakukan perbaikan inisiasi *web based* yang telah dikerjakan dan memastikan bahwa masing-masing analis legislatif telah memiliki akun yang dapat mengakses *website dummy* tersebut dan fungsi pada *web* dapat digunakan dengan baik.
 - b. Melakukan uji coba penggunaan *web based* dalam pembuatan Isu Sepekan.
- Jadwal minggu keempat (hingga 26 September 2024):
 - c. Melakukan konsultasi terakhir dengan *coach* dan mentor terkait finalisasi *project* aktualisasi.
 - d. Membuat video tutorial pembuatan Isu Sepekan menggunakan *web based*.
 - e. Melakukan sosialisasi atau demo terkait penggunaan Teknologi Informasi *web based* dalam pembuatan Isu Sepekan yang dihadiri langsung oleh Mentor, Penguji, dan Kepala Pusat Analisis Keparlemenan (Eselon II).

5.2. Penjelasan Tahapan Kegiatan

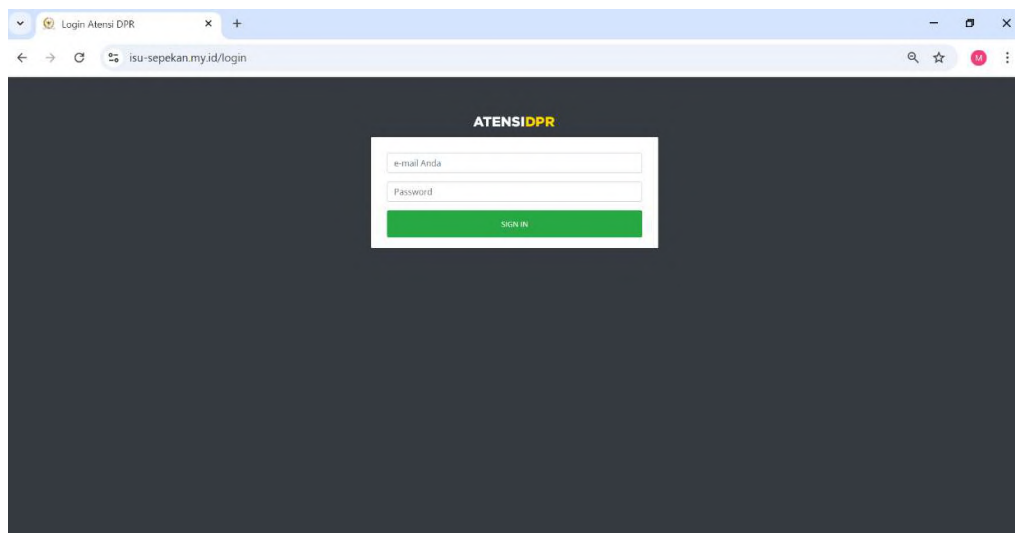
Membuat *web based* untuk *template* pembuatan Isu Sepekan. Berikut ini merupakan *web based dummy* yang berfungsi dalam pembuatan Isu Sepekan. Situs ini dapat diakses melalui: <http://www.isu-sepekan.my.id/> (*hosting web* selama 3 bulan).

Gambar 10. Tampilan Awal *Web Based* Pembuatan Isu Sepekan



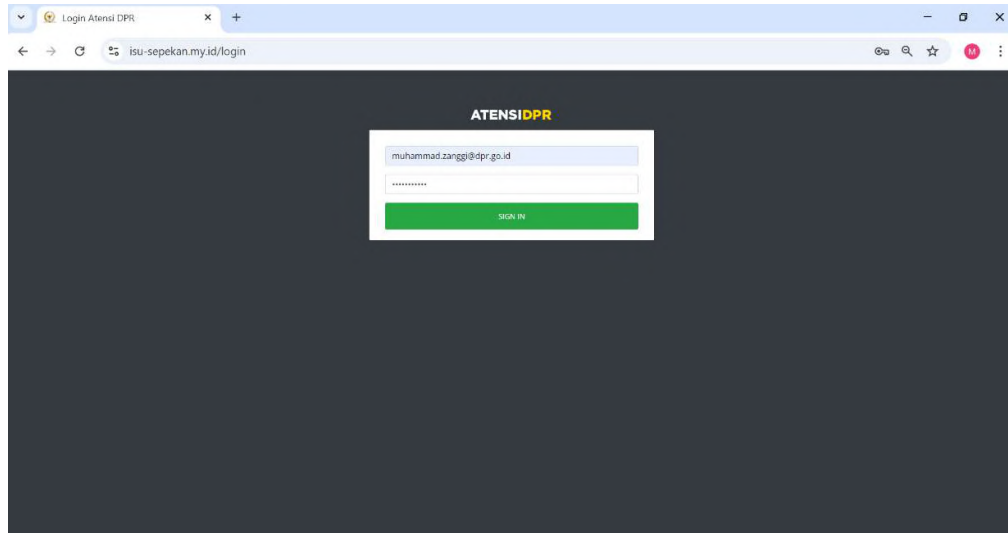
Kemudian, masing-masing analis legislatif pada dasarnya sudah dibuatkan akun menggunakan email DPR yang diperoleh dari *database* portal DPR. Oleh karena itu, situs ini eksklusif hanya bisa digunakan oleh analis legislatif yang memiliki email DPR saja dan masing-masing analis legislatif dapat masuk ke situs tersebut dan membuat Isu Sepekan. Kemudian dengan menggunakan kata sandi *default*, masing-masing Analis Legislatif mampu masuk ke dalam *dashboard*.

Gambar 11. Halaman *Log In*



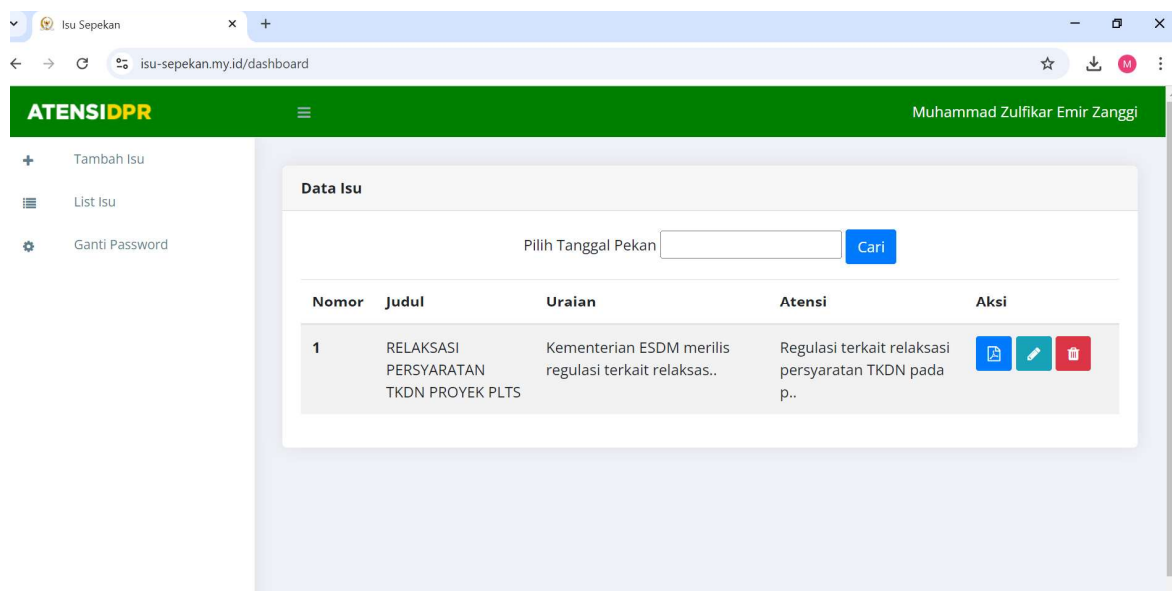
Kemudian, masing-masing analis legislatif memasukkan *e-mail* DPR dan kata sandi *default* yang telah dibuat.

Gambar 12. Halaman *Log In* yang Telah Diisi



Setelah itu, berikut ini merupakan tampilan setelah diisi *email* dan kata sandi *default*.

Gambar 13. *Dashboard* masing-masing Analis Legislatif

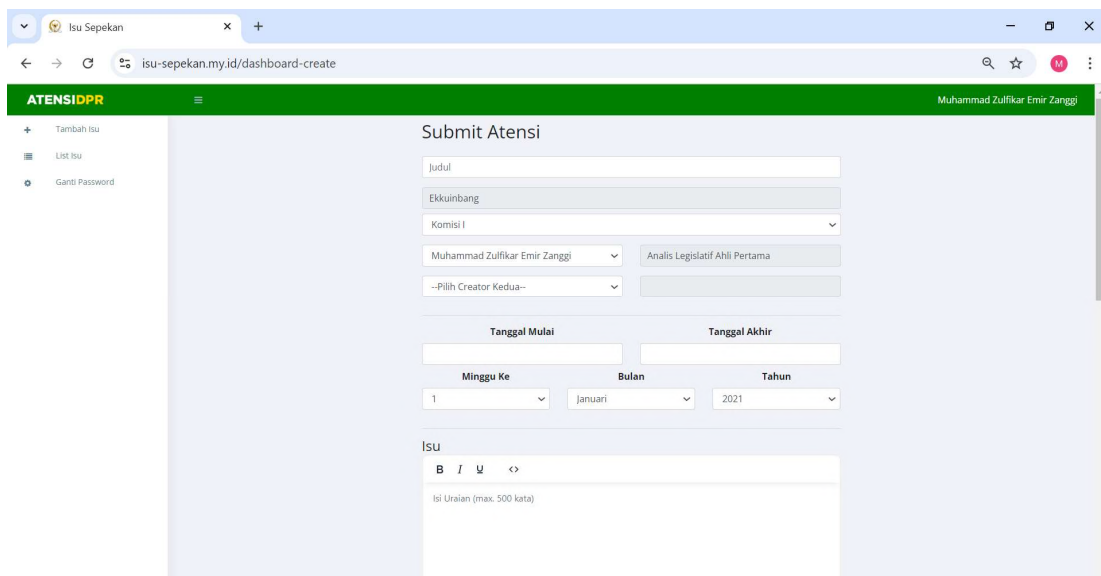


Penjelasan:

1. **Tambah Isu:** Untuk menambahkan Isu Sepekan yang baru.
2. **List Isu:** Daftar Isu Sepekan yang sudah dibuat. Pada list Isu Sepekan ini akan dapat dilihat oleh seluruh Analis Legislatif.
3. **Ganti Password:** Digunakan untuk mengganti password atau kata sandi Analis Legislatif.
4. Ada nama analis legislatif di pojok kanan atas sebagai pemilik akun.
5. Kemudian ada tombol  yang digunakan untuk melihat Isu Sepekan yang sudah ter-*layout* dalam bentuk pdf.
6. Kemudian ada tombol  yang digunakan untuk meng-*edit* kembali Isu Sepekan apabila ada revisi atau kekesalahan.
7. Kemudian ada tombol  yang digunakan untuk menghapus Isu Sepekan.
8. Kemudian ada tampilan daftar Isu Sepekan yang sudah dibuat dimana terdapat data-data singkat terkait nomor, judul, uraian, atensi, dan aksi terhadap Isu Sepekan tersebut.

Analisis Legislatif yang hendak membuat Isu Sepekan, masuk ke “Tambah Isu” kemudian akan tampil seperti berikut:

Gambar 14. Tampilan “Tambah Isu”



The screenshot shows a web browser window with the URL `isu-sepekan.my.id/dashboard-create`. The page title is "Isu Sepekan". The main content area is titled "Submit Atensi" and contains the following form elements:

- Judul:** A text input field.
- Ekkuinbang:** A text input field.
- Komisi I:** A dropdown menu.
- Muhammad Zulfikar Emir Zanggi:** A dropdown menu.
- Analisis Legislatif Ahli Pertama:** A dropdown menu.
- Pilih Creator Kedua--:** A dropdown menu.
- Tanggal Mulai:** A date input field.
- Tanggal Akhir:** A date input field.
- Minggu Ke:** A dropdown menu.
- Bulan:** A dropdown menu.
- Tahun:** A dropdown menu.
- Isu:** A text input field with a rich text editor toolbar (B, I, U, <>).
- isi Uraian (max. 500 kata):** A text input field.

Terdapat beberapa kolom yang diperlukan untuk diisi dalam pembuatan Isu Sepekan. Kolom-kolom yang perlu diisi tersebut nantinya bersumber dari analisis Isu Sepekan yang sudah final dan siap untuk di-*layout*.

Penjelasan:

1. **Judul:** Untuk menambahkan judul Isu Sepekan yang baru.
2. Pembidangan akan secara otomatis sesuai dengan pemilik akun.
3. **Komisi:** Untuk memilih komisi yang berhubungan dengan Isu yang akan diangkat.
4. **Nama Penulis dan Jabatan Analis Legislatif:** Daftar nama analis legislatif yang bisa dipilih. Jumlah penulis dapat dimasukkan hingga 2 penulis.
5. **Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir:** Tanggal yang digunakan dan ditampilkan dalam Isu Sepekan.
6. **Minggu, Bulan, Tahun:** Merupakan data terkait Isu yang dibahas pada periode tertentu yang akan dibuat.
7. **Isu:** Merupakan ringkasan Isu dan Pembahasan yang sudah dibuat Analis Legislatif yang terdiri maksimal 650 kata. Pada ringkasan Isu dan Pembahasan ini sebelumnya telah dibuat Analis Legislatif melalui analisis dari berbagai sumber. Apabila terdapat lebih dari 650 kata, maka sistem akan membaca bahwa Isu Sepekan yang digunakan melebihi jumlah kata yang diperbolehkan dan tidak bisa di-*submit*. Hal ini merupakan sistem kontrol yang dilakukan, karena SOP Isu Sepekan adalah isu aktual yang hanya terdiri dari maksimal 650 kata dan 2 halaman saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar Isu Sepekan yang dibuat dapat di-*submit* dan menjadi Isu Sepekan yang berformat pdf.
8. **Atensi:** Merupakan ringkasan analisis dan rekomendasi untuk masing-masing komisi terhadap Isu dan Pembahasan yang telah dijelaskan pada kolom sebelumnya. Pada Atensi, jumlah kata yang digunakan maksimal adalah 150 kata. Apabila melebihi, akan muncul notifikasi juga bahwa jumlah kata yang digunakan melebihi dan tidak dapat di-*submit*. Oleh karena itu, perlu kemudian adanya revisi atau penyesuaian kembali.
9. **Sumber:** Merupakan daftar sumber pustaka yang digunakan dalam analisis Isu Sepekan tersebut.

Gambar 15. Contoh Pengisian Kolom Isu Sepekan

RELAKSASI PERSYARATAN TKDN PROYEK PLTS

Edisi	Minggu ke-3 Bulan Agustus 2024 (tanggal 12 s.d. 18 Agustus 2024)
Komisi	Komisi VII DPR RI
Penulis	Nama Lengkap: T. Ade Surya Jabatan/Bidang: Analis Legislatif Ahli Madya/Ekkuinbang Email: teuku.surya@dpr.go.id
Editor	Devil Wuryandani
Isu/Permasalahan	Kementerian ESDM merilis regulasi terkait relaksasi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang efektif berlaku per tanggal 31 Juli 2024. Relaksasi persyaratan TKDN pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan ditujukan untuk proyek PLTS yang perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat tanggal 31

Submit Atensi

RELAKSASI PERSYARATAN TKDN PROYEK PLTS

Ekkuinbang

Komisi VII

T. Ade Surya

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi

Tanggal Mulai: 2024/08/12

Tanggal Akhir: 18

Minggu Ke: 3

Isu:
 B I U <>
 Isi Uraian (max. 500 kata)

Gambar 16. Contoh Hasil Pengisian Kolom Isu Sepekan

Submit Atensi

RELAKSASI PERSYARATAN TKDN PROYEK PLTS

Ekkuinbang

Komisi I

T. Ade Surya

Analis Legislatif Ahli Madya

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi

Analis Legislatif Ahli Pertama

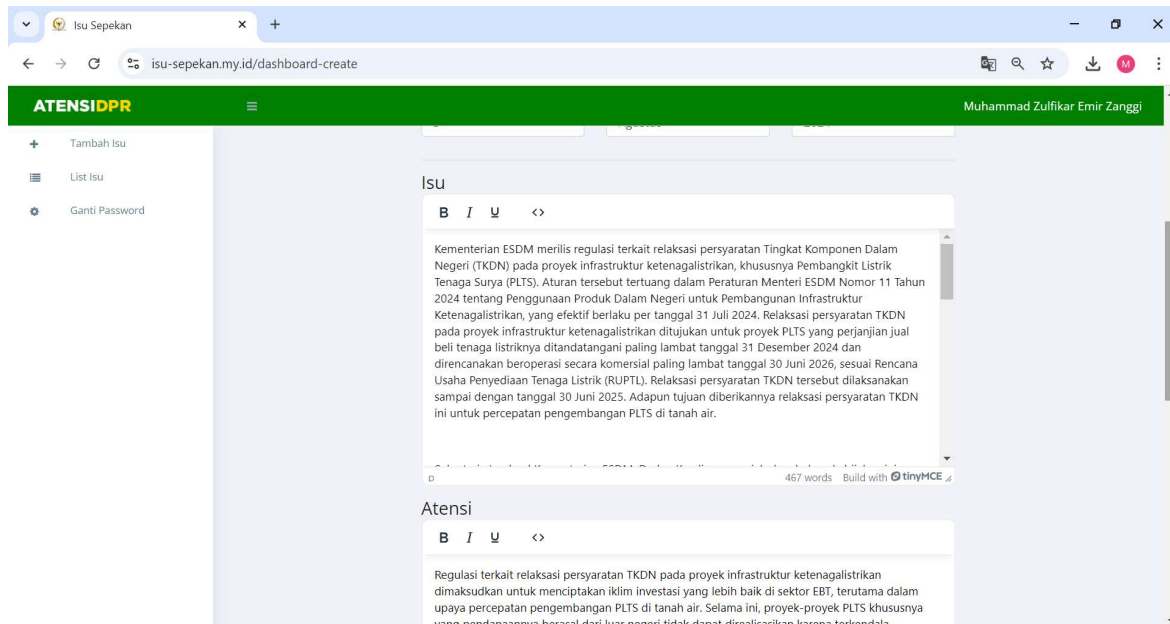
Tanggal Mulai: 2024/08/12

Tanggal Akhir: 2024/08/18

Minggu Ke: 3

Bulan: Agustus

Tahun: 2024



Kemudian klik submit pada bagian paling bawah laman. Sehingga muncul tampilan seperti Gambar 13. Kemudian klik logo () tersebut, kemudian akan muncul tampilan seperti Gambar 17.

Gambar 17. Hasil PDF Pembuatan Isu Sepekan dengan *Web Based*



Format pada Gambar 17, bisa diunduh dalam format PDF secara instan. Selain itu, format tersebut juga dapat di *print* secara langsung. Keseluruhan proses pembuatan

layouting Isu Sepekan ini dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 10 menit. Oleh karena itu, secara kuantitas akan bertambah secara signifikan dan semua komisi dalam AKD dapat terlayani dengan cepat tanpa mengurangi kualitas substansi isi Isu Sepekan tersebut. Secara kuantitas dapat bertambah dan secara kualitas terjaga bahkan mampu memberikan substansi lebih baik. Setelah dipastikan bahwa sistem *web based* untuk membuat Isu Sepekan berjalan dengan baik, kemudian Penulis melakukan sosialisasi atau demo kepada analis legislatif di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan dan dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Pusat Analisis Keparlemenan.

Gambar 18. Sosialisasi dan Demo Pembuatan Isu Sepekan dengan *Web Based*





Gambar-gambar pada Gambar 18 merupakan bukti-bukti telah dilakukannya demo atau sosialisasi penggunaan *web based* dalam pembuatan Isu Sepekan di lingkungan Pusat Analisis Keparlemanan.

5.3. *Stakeholder*

Berdasarkan pemaparan Rancangan Aktualisasi penulis, *stakeholder* yang terlibat adalah:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hal ini dikarenakan Isu Sepekan adalah produk yang langsung didistribusikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) guna mendukung fungsi legislatif secara substansi. Sebagai supporting system anggota DPR RI, keberadaan Isu Sepekan dapat membantu Anggota Dewan dalam memberikan *insight*, pandangan, dan wawasan isu-isu terkini.

2. Analis Legislatif Senior

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan terkait bagaimana pengelolaan Isu Sepekan yang selama ini dijalankan oleh senior.

3. Analis Legislatif ahli Pertama dan Analis Legislatif Ahli Muda

Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi utama seorang analis legislatif pertama dan muda adalah membuat Isu Sepekan. Produk yang dihasilkan analis legislatif ahli pertama dan ahli muda salah satunya adalah Isu Sepekan.

4. Pusat Teknologi dan Informasi (Pustekinfo) Setjen DPR RI

Hal ini dikarenakan pengembangan sistem yang berkaitan dengan Teknologi Informasi nantinya dapat melakukan kolaborasi dengan unit kerja lain seperti Pustekinfo. Hal ini juga dapat masuk dalam agenda rencana pengembangan sistem untuk memudahkan kerja analis legislatif dan masuk dalam RITIK (Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi).

5. Masyarakat

Hal ini dikarenakan pemenuhan *feeding* substansi cepat melalui Isu Sepekan juga dapat memberikan informasi mengenai dinamika isu-isu yang sedang terjadi dan menjadi bahan konsiderasi untuk ditindaklanjuti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

5.4. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Kendala dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi masih dapat terjadi yang dapat mengganggu proses implementasi dari ide yang telah dibentuk. Menurut penulis, terdapat beberapa kendala yang dihadapi penulis dan langkah atau strategi apa yang dapat dilakukan oleh penulis untuk menghadapi tiap kendala tersebut, diantaranya ialah:

Tabel 5. Kendala dan Strategi Aktualisasi

No	Kendala	Strategi
1.	Proses pengumpulan isu-isu instansi/unit kerja	Melakukan observasi, pengambilan data, pengambilan kuesioner data terkait Isu Sepekan, dan wawancara dengan <i>stakeholder</i>
2.	Keterbatasan dana dalam pembuatan maupun biaya <i>hosting web prototype web based</i> untuk pembuatan Isu Sepekan	Menjadikan aktualisasi ini sebagai masukan sebagai produk pengembangan yang bisa dikembangkan oleh unit kerja lain seperti Pustekinfo dalam RITIK (Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi), sehingga menciptakan lingkungan yang saling berkolaborasi dan mendukung pengembangan penggunaan anggaran secara akuntabel.
3.	Tata cara pembuatan Isu Sepekan dengan <i>web based</i>	Dilakukan pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Video Tutorial terkait pembuatan Isu Sepekan menggunakan <i>web based</i> .

5.5. Analisis Dampak

Berikut ini merupakan analisis dampak dari *core* isu yang diangkat dalam penulisan analisis isu instansi/unit kerja yang penulis kerjakan: Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan).

- a. Kehilangan relevansi dan keterbaruan isu. Produk Isu Sepekan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi analis legislatif ahli pertama dalam menganalisis isu-isu terkini secara terjadwal dalam kurun satu minggu guna memberikan dukungan substansi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya di lembaga legislatif. Keterlambatan dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan mampu memengaruhi secara signifikan relevansi dan keterbaruan isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat. Diharapkan dengan adanya Isu Sepekan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapat input substantif dalam melaksanakan tugasnya. Keterlambatan penerbitan Isu Sepekan akan menghambat proses penyampaian hasil analisis analis legislatif dan menghilangkan relevansi dan keterbaruan isu tersebut.

- b. Adanya dampak turunnya kepercayaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap produk-produk substantif Pusat Analisis Keparlemenan seperti Isu Sepekan. Hal ini berkaitan dengan etika profesi dan profesionalisme analis legislatif dalam menjalankan tugasnya. Ketidakmampuan untuk membuat publikasi tepat waktu dapat menjadi faktor turunnya kepercayaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap unit kerja Pusat Analisis Keparlemenan.
- c. Turunnya penilaian kinerja analis legislatif. Adanya keterlambatan dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan mampu memengaruhi penilaian kinerja baik secara individu maupun unit kerja secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan performansi pegawai maupun unit kerja dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya yang tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Hilangnya profesionalisme dalam bekerja juga menjadi faktor turunnya penilaian kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan.
- d. Peningkatan kualitas Isu Sepekan yang dibuat oleh Analis Legislatif. Hal ini dikarenakan fokus analis legislatif dapat ditujukan kepada substansi analisis karena pengerjaan *layout* terbantu dengan adanya sistem ini. Selain itu, dengan adanya kualitas substansi yang lebih mendalam dapat membantu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat keputusan. *Feeding* berkualitas yang didukung oleh Badan Keahlian ini nantinya juga mampu memberikan kontribusi dalam rapat-rapat maupun proses diplomasi parlemen oleh DPR RI.
- e. Adanya efisiensi penggunaan waktu pembuatan Isu Sepekan juga menjadi hal yang berdampak dari adanya inovasi ini. Peningkatan kuantitas Isu Sepekan yang dibuat oleh Analis Legislatif dikarenakan efisiensi penggunaan waktu *layout* dalam pembuatan *template* Isu Sepekan. Jumlah Isu Sepekan yang dibuat oleh Analis Legislatif secara kuantitatif dapat bertambah signifikan dengan adanya sistem *web based* ini. Sehingga Pusat Analisis Keparlemenan selaku *supporting system* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mampu memberikan *feeding* substansi yang lebih cepat, efektif dan efisien dalam hal persidangan, rapat-rapat, fungsi diplomasi, dan kepentingan untuk pengambilan keputusan DPR RI.
- f. Pennulisan Isu Sepekan pada dasarnya sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam tata cara dan alur proses pembuatannya. SOP Isu Sepekan, tertuang dalam SOP nomor PP/10-420/SETJEN DPR RI/02/2021. Diharapkan dengan adanya proses automasi editing pembuatan Isu Sepekan ini juga dapat mengefisienkan dan mempercepat alur proses pembuatan Isu Sepekan.

- g. Pemanfaatan proses automasi *editing* Isu Sepekan juga dapat berdampak pada interoperabilitas pemanfaatan proses automasi *editing* pada produk-produk lain seperti pembuatan pidato yang sudah memiliki template yang baik dan penggunaan biro lain dalam hal analisis yang menggunakan *template* tertentu. Hal ini sejalan dengan semangat ASN BerAKHLAK dalam hal kolaboratif.
- h. Pemanfaatan proses automasi *editing* menggunakan *web based* juga berdampak pada penggunaan *tools* ini dalam menyajikan isu-isu harian guna mendukung fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Aktualisasi "Pemanfaatan Teknologi Informasi Web Based dalam Pembuatan Isu Sepekan" berfokus pada inovasi pembuatan Isu Sepekan utilisasi pemanfaatan Teknologi Informasi. Inovasi ini memiliki kebermanfaatan untuk memudahkan analisis legislatif dalam membuat Isu Sepekan secara lebih cepat dan efisien. Efisiensi yang dimaksud adalah pembuatan Isu Sepekan ini meminimasi kerja layouter dalam proses editorialnya karena memanfaatkan teknologi informasi web based secara instan yang langsung tertata. Automasi proses editorial pembuatan Isu Sepekan ini sesuai dengan semangat nilai-nilai core values ASN BerAKHLAK, khususnya pada nilai Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif, dan Kolaboratif. Berorientasi pelayanan, dikarenakan memudahkan untuk memberikan pelayanan kepada anggota DPR RI dalam hal substansi dengan pembuatan Isu Sepekan yang lebih ringkas sesuai dengan tugas dan fungsi analisis legislatif. Sebagai supporting system DPR RI, pemanfaatan web based dalam pembuatan Isu Sepekan mampu menaikkan kuantitas pembuatan Isu Sepekan tiap minggunya. Sehingga tidak hanya terbatas pada beberapa komisi dikarenakan keterbatasan layouter, melainkan dapat menaikkan performansi outcome Pusat Analisis Keparlemenan. Kompeten, karena peningkatan efisiensi pembuatan Isu Sepekan adalah bagian terus mengembangkan kompetensi analisis legislatif dalam hal optimasi pemanfaatan teknologi. Adaptif dikarenakan selalu berusaha beradaptasi dengan perkembangan zaman dan terus melakukan inovasi untuk memudahkan pekerjaan analisis legislatif, khususnya pekerjaan yang nantinya akan diemban CPNS menjadi analisis legislatif ahli pertama. Kolaboratif karena mampu melibatkan unit kerja lain dan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama untuk menjadikan parlemen modern. Dengan pemanfaatan automasi proses editorial untuk pembuatan Isu Sepekan yang diusulkan akan dapat mempermudah tugas dan fungsi analisis legislatif, khususnya analisis legislatif ahli pertama dan analisis legislatif ahli muda dalam membuat Isu Sepekan dengan proses yang lebih efektif dan efisien, kedepannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil analisis PUSAKA, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap unit kerja dan instansi.

Selain itu, ditinjau dari kebermanfaatannya adalah efisiensi waktu jika dibandingkan dengan existing system yang dilakukan saat ini. Saat ini, jadwal pengumpulan Isu Sepekan adalah pada hari Minggu atau Senin, kemudian dilakukan layouting selama 1-2 hari dan diunggah di sosial media Pusaka maupun web resmi Pusaka. Pada awal September 2024, terdapat keterlambatan dalam mengunggah produk Pusaka juga menjadi perhatian yang perlu diperbaiki. Melalui pemanfaatan sistem ini, pembuatan Isu Sepekan akan jauh menjadi lebih cepat dan efisien dalam mendukung fungsi-fungsi DPR RI. Hal ini bisa menjadi capaian yang lebih baik karena efisiensi pembuatan Isu Sepekan.

Kemudian, adanya peningkatan kualitas Isu Sepekan yang dibuat oleh Analis Legislatif. Hal ini dikarenakan fokus analisis legislatif dapat ditujukan kepada substansi analisis karena pengerjaan layouter terbantu dengan adanya sistem ini. Selain itu, dengan adanya kualitas substansi yang lebih mendalam dapat membantu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat keputusan. *Feeding* berkualitas yang didukung oleh Badan Keahlian ini nantinya juga mampu memberikan kontribusi dalam rapat-rapat, persidangan, maupun proses diplomasi parlemen DPR RI karena kuantitas yang bertambah dan kualitas analisis yang terjaga baik.

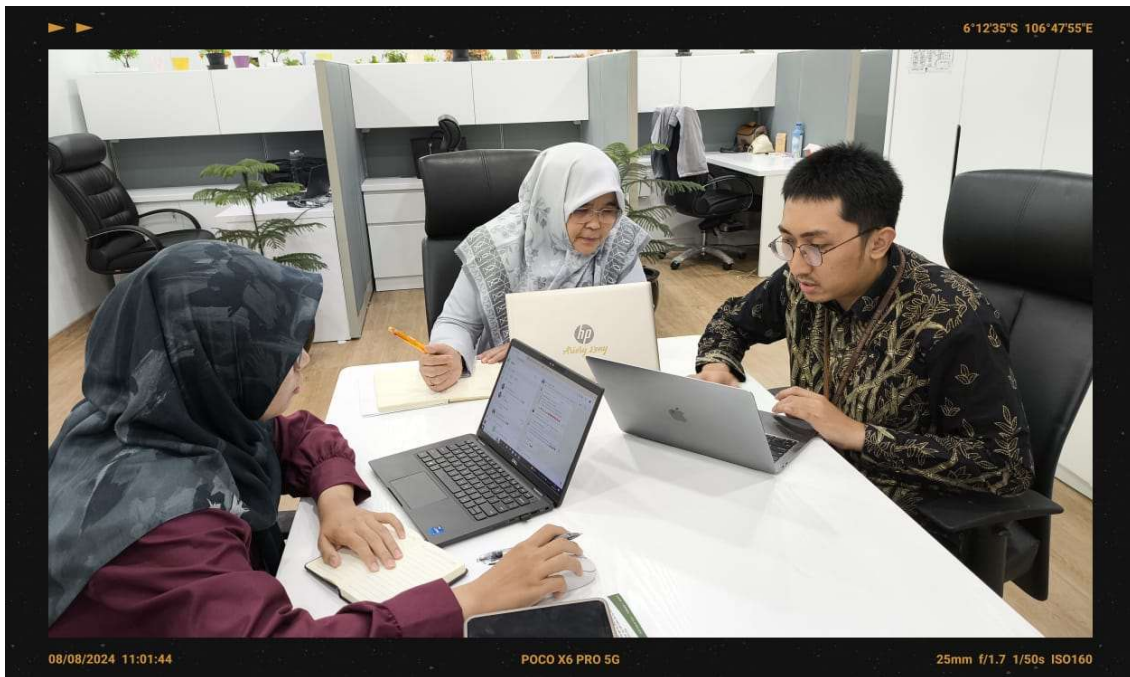
6.2. Saran

1. Pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis *web based* untuk membuat sistem serupa untuk produk-produk Pusaka yang lain. Hal ini juga bisa dikolaborasikan dengan unit kerja lain seperti Pusat Teknologi dan Informasi (Pustekinfo) dalam agenda RITIK (Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi).
2. Adanya efisiensi jumlah *layouter* dalam Pembuatan Isu Sepekan. Penulis merasa bahwa layouter Isu Sepekan terlalu banyak, sehingga dengan adanya sistem ini, proses efisiensi jumlah layouter dan membantu kerja layouter dalam membuat Isu Sepekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/191917/peraturan-lan-no-1-tahun-2021> Diakses 30 Juli 2024.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216627/permen-pan-rb-no-11-tahun-2022> Diakses 30 Juli 2024.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5831/pp-no-11-tahun-2017> Diakses 30 Juli 2024.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Tersedia pada: https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_sekjen/2020persekjendpr010.pdf Diakses 30 Juli 2024.
- Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tersedia pada: https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_sekjen/2023persekjendpr012.pdf Diakses 30 Juli 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (2023). tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023> Diakses 30 Juli 2024. Diakses 30 Juli 2024.

LAMPIRAN



Lampiran 2. Formulir Alat Bantu Coaching

**FORMULIR ALAT BANTU
PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XI
TAHUN 2024**

Nama : Muhammad Zulfikar Emir Zanggi Nama Coach: Izzaty, S.T., M.E.
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199307202024041001

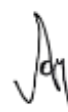
No.	Tanggal Pembimbingan	Isu atau Hal Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	29 Juli 2024	Identifikasi isu di unit kerja	Zoom meeting	Pilih isu yang sesuai dengan tugas dan fungsi	
2	5 Agustus 2024	Penetapan <i>Core Issue</i> yang dipilih untuk rancangan aktualisasi.	Zoom meeting	Buat rangkaian kegiatan serta tahapan kegiatannya.	
3	8 Agustus 2024	Pengarahan mengenai rangkaian kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi	Zoom meeting	Diskusikan dengan mentor, pembuatan materi presentasi	
4	12 Agustus 2024	Finalisasi rancangan aktualisasi	Zoom meeting	Simulasi presentasi untuk seminar rancangan aktualisasi	
5	28 Agustus 2024	Laporan mingguan pertama pelaksanaan aktualisasi	Whatsapp	Melaksanakan konsultasi dengan coach dan mentor, pencarian data-data terkait core isu, dan pelaporan Rancangan Aktualisasi final.	
6	6 September 2024	Laporan mingguan kedua pelaksanaan aktualisasi	Tatap muka	Melakukan inisiasi pembuatan Rancangan Aktualisasi yang telah disetujui dengan membuat data-data entitas penulis isu sepekan, pembuatan juknis dan <i>flowchart</i> , inisiasi pembuatan website dummy	
7	17 September 2024	Laporan mingguan ketiga pelaksanaan aktualisasi	Whatsapp	Finalisasi <i>website dummy</i> yang berfungsi baik untuk pembuatan isu sepekan dan <i>trial</i> (uji coba)	
8	26 September 2024	Laporan mingguan keempat pelaksanaan aktualisasi	Tatap Muka	Membuat video tutorial pemanfaatan web	

				based dalam pembuatan Isu Sepekan dan melakukan sosialisasi atau demo terkait penggunaan web based dalam pembuatan Isu Sepekan yang dihadiri oleh rekan-rekan di lingkungan Pusaka, Penguji, Mentor, hingga Kepala Pusat Analisis Keparlemenan.	
9	30 September 2024	Coaching finalisasi pelaksanaan Laporan Aktualisasi di Kopo, Bogor	Tatap Muka	Finalisasi Laporan Pelaksanaan Aktualisasi dengan Coach	

*) Pembimbingan yang sah adalah yang Ditandatangani oleh Coach

FORMULIR ALAT BANTU MENTORING LAPORAN AKTUALISASI

Nama : Muhammad Zulfikar Emir Zanggi
NIP : 199307202024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama
Isu: : Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan (adanya keterlambatan penerbitan Isu Sepekan.
Gagasan: : Pemanfaatan Teknologi Informasi *Web Based* dalam Pembuatan Isu Sepekan.

No	Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output	Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai BerAKHLAK	Catatan Mentor	Paraf Mentor
1.	Konsultasi awal untuk penetapan <i>core issue</i> yang dipilih dalam rancangan aktualisasi							
	29 Juli 2024	a.) Konsultasi mengenai isu-isu yang ditemukan	Penetapan <i>core Issue</i>	- Bentuk pertanggungjawaban terkait aktualisasi di depan mentor (Akuntabel) - Sopan santun dan beretika dalam berkomunikasi melalui media sosial whatsapp (<i>digital ethics</i>)	Terwujudnya dukungan substansi Komisi dan AKD yang profesional dan akuntabel	Akuntabel, Kompeten	1. Pemilihan isu 2. Melanjutkan ke tahap analisis <i>core issue</i> 3. Perbaikan penulisan kata asing dicetak miring	
	1 Agustus 2024	b.) Konsultasi mengenai <i>core issue</i> yang dipilih					4. Perbaikan penulisan kalimat yang tepat pada isu-isu yang diidentifikasi 5.	

Analisis Isu dengan penyebab akar masalah								
2.	5 Agustus 2024	a.) Konsultasi mengenai penetapan <i>core isu</i> dan pengumpulan data	Data awal aktualisasi	- Bentuk pertanggungjawaban terkait aktualisasi di depan mentor (Akuntabel) - Menambah kompetensi diri (Kompeten)	Terwujudnya dukungan substansi Komisi dan AKD yang profesional dan akuntabel	Akuntabel, Kompeten	- Melanjutkan ke gagasan pemecahan isu - Perdalam dan pelajari mengenai tata cara pengumpulan data awal - Tambah responden dan sumber wawancara awal masalah aktualisasi	
		b.) Konsultasi mengenai faktor penyebab terjadinya masalah	Penentuan penyebab utama terjadinya masalah					
Gagasan pemecahan isu								
3.	8 Agustus 2024	a.) Konsultasi mengenai gagasan-gagasan kreatif yang dibuat dan rangkaian kegiatan dan tahapan aktualisasi	Penentuan gagasan pemecahan isu	- Melakukan perbaikan tiada henti untuk memberi pelayanan <i>feeding</i> substansi maksimal berkualitas (Berorientasi Pelayanan) - Bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan (Akuntabel) - Menambah kompetensi Analis Legislatif dikarenakan fokus substansi Isu Sepekan (Kompeten) - Kemampuan menggunakan	- Terwujudnya dukungan substansi Komisi dan AKD yang profesional dan akuntabel - Menjadi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Akuntabel, Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif	- Melanjutkan ke pembuatan tahapan kegiatan penyelesaian isu - Perbaiki penulisan rancangan aktualisasi	

				Teknologi Informasi (Digital Skill)				
4.	Tahapan Kegiatan Penyelesaian Isu							
	12 Agustus 2024	a.) Diskusi mengenai finalisasi kegiatan untuk rancangan aktualisasi	Matriks Rancangan Aktualisasi	- Bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan (Akuntabel) - Berdiskusi dan berkomunikasi dengan mentor secara harmonis dan saling menghargai (harmonis) - Berkonsultasi dan berdiskusi dengan mentor untuk melakukan pengembangan diri (Manajemen ASN)	- Terwujudnya dukungan substansi Komisi dan AKD yang profesional dan akuntabel - Menjadi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Akuntabel, Harmonis	- Melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk seminar rancangan aktualisasi - Lengkapi <i>evidence</i> di bagian lampiran - Buat matriks Rancangan Aktualisasi - Finalisasi Rancangan Aktualisasi	
5.	Revisi Rancangan Aktualisasi dari Penguji							
	26 Agustus 2024	a.) Diskusi mengenai saran dan perbaikan dari penguji	Rancangan Aktualisasi Final	- Bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan (Akuntabel) - Berdiskusi dan berkomunikasi	Terwujudnya dukungan substansi Komisi dan AKD yang profesional dan akuntabel	Akuntabel, Harmonis	Perbaiki penyusunan bagan pada jabatan fungsional analis legislatif	

		b.) Menentukan hal dan bagian pada rancangan yang harus di revisi berdasarkan saran penguji		dengan Mentor secara harmonis dan saling menghargai (Harmonis) Berkonsultasi dan berdiskusi dengan Mentor untuk melakukan pengembangan diri (Manajemen ASN)	Menjadi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.		- Menambahkan kebermanfaatan terkait aktualisasi dengan persidangan - Merevisi perbaikan terkait peraturan perundang-undangan yang digunakan. - Perbaikan terkait tipografi dan penulisan.	
Konsultasi Pembuatan <i>Web Based dummy</i> sebagai produk aktualisasi.								
6.	6 September 2024	a.) Diskusi mengenai Inisiasi pembuatan aktualisasi.	Web Based	- Bekerja sama untuk menghasilkan yang terbaik. (Kolaboratif) - Membuat inisiasi <i>web based</i> untuk pembuatan Isu Sepekan (Kompeten) - Berkomunikasi secara harmonis dan saling menghormati (Harmonis) - Mencoba menggunakan <i>web based</i> dalam pembuatan Isu Sepekan (<i>Digital Skill</i>)	Menjadi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Kolaboratif, Kompeten, Harmonis	- Membuat <i>flowchart</i> dan juknis pembuatn Isu Sepekan dengan menggunakan <i>web based</i>. - Membuat inisiasi <i>web based dummy</i> dalam pembuatan Isu Sepekan.	
		b.) Diskusi mengenai membuat petunjuk teknis dan <i>flowchart</i> pembuatan Isu Sepekan menggunakan <i>web based</i> .	Flowchart dan Juknis					

	Sosialisasi produk Aktualisasi dan Finalisasi Laporan Aktualisasi							
8.	26 September 2024	a.) Membuat Slide presentasi Laporan Pelaksanaan Aktualisasi dan melakukan Sosialisasi dan Demo penggunaan Automasi <i>Editing</i> dengan <i>Web Based</i> di lingkungan Pusat Analisis Keparlemenan.	Slide Presentasi dan Sosialisasi Demo	- Adaptasi terhadap perkembangan Teknologi Informasi (Adaptif) - Menambah kompetensi diri dengan mengajarkan ke analis legislatif lain untuk menggunakan <i>web based</i> dalam pembuatan Isu Sepekan (Kompeten) - Mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. (<i>Digital Skill</i>)	Terwujudnya dukungan substansi Komisi dan AKD yang profesional dan akuntabel	Adaptif, Kompeten	- Melengkapi dan memeriksa kembali laporan pelaksanaan aktualisasi - Melatih presentasi agar sesuai dengan waktu yang diberikan	
		b.) Finalisasi Laporan Aktualisasi	Laporan Aktualisasi					



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-1.

Nama : Muhammad Zulfikar Emir Zanggi
NIP : 199307202024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Isu : Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan.
Gagasan : Pemanfaatan Teknologi Informasi *Web Based* dalam Pembuatan Isu Sepekan.

No.	Kegiatan	Evidence
1.	Melakukan konsultasi dengan coach dan mentor terkait gagasan kreatif.	
2.	Melakukan pencarian data-data dan fakta core isu.	
3.	Melaporkan rancangan aktualisasi kepada mentor dan coach.	

Jakarta, 26 Agustus 2024
Mengetahui,

Coach



Izzaty, S.T., M.E.

NIP. 197712052009122001

Mentor



Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

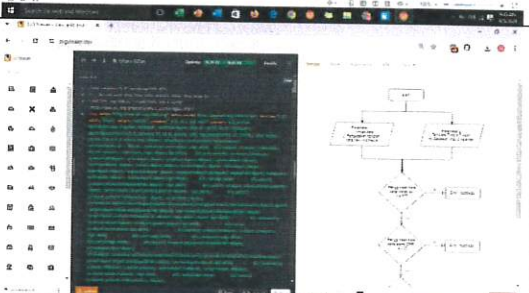
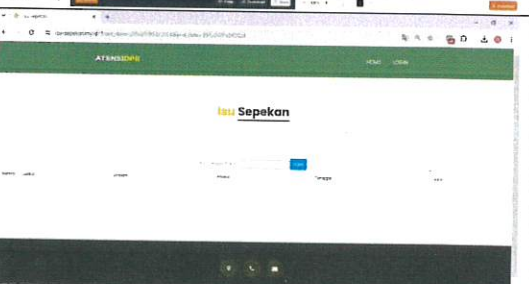
NIP. 197503262009122002



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-2.

Nama : Muhammad Zulfikar Emir Zanggi
NIP : 199307202024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Isu : Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan.
Gagasan : Pemanfaatan Teknologi Informasi *Web Based* dalam Pembuatan Isu Sepekan.

No.	Kegiatan	Evidence
1.	Melakukan inisiasi pembuatan Rancangan Aktualisasi yang telah disetujui. (Membuat data-data entitas penulis Isu Sepekan secara keseluruhan)	
2.	Membuat petunjuk teknis terkait penggunaan <i>web based</i> dalam pembuatan Isu Sepekan. (Flowchart - Juknis)	
3.	Membuat inisiasi <i>website dummy</i> yang belum direvisi.	

Jakarta, 6 September 2024
Mengetahui,

Coach

Izzaty, S.T., M.E.
NIP. 197712052009122001

Mentor

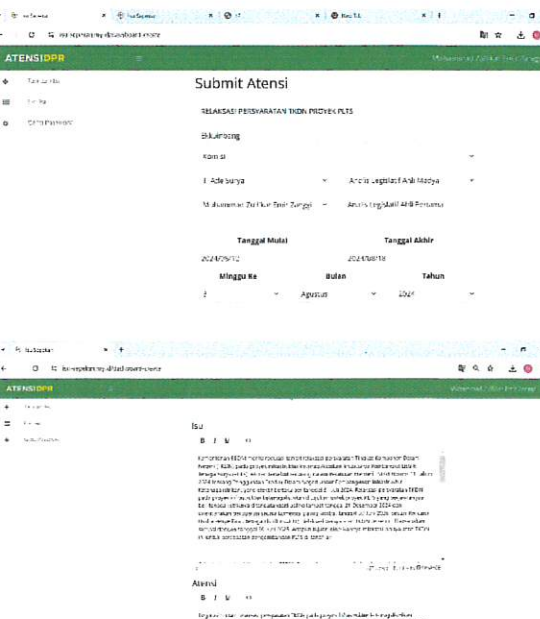
Dr. Ariesty Tri Mauleny, S.Si., M.E.
NIP. 197503262009122002



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3.

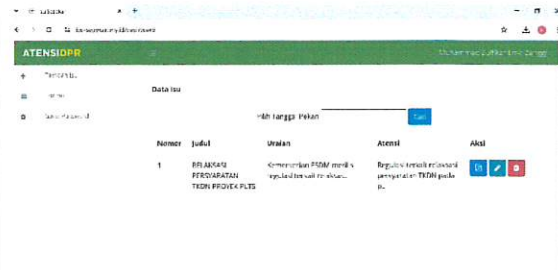
Nama : Muhammad Zulfikar Emir Zanggi
NIP : 199307202024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Isu : Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan
Gagasan : Pemanfaatan Teknologi Informasi *Web Based* dalam Pembuatan Isu Sepekan

No.	Kegiatan	Evidence
1.	Melakukan perbaikan inisiasi <i>web based</i> yang telah dikerjakan. Memastikan bahwa masing-masing analis legislatif telah memiliki akun dapat melakukan akses dan fungsi pada web dapat digunakan dengan baik.	Dapat diakses melalui: http://www.isu-sepekan.my.id Berikut ini <i>interface</i> awal: 
2.	Melakukan uji coba penggunaan <i>web based</i> dalam pembuatan Isu Sepekan	<i>Input</i> data-data terkait Isu Sepekan pada <i>web</i> untuk dibuat secara otomatis. 



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

User interface terkait “Daftar List Isu Sepekan” dan “Create Isu Sepekan” untuk membuat Isu Sepekan:



Contoh hasil produk Isu Sepekan yang dibuat melalui web-based



Jakarta, 17 September 2024
Mengetahui,

Coach

Izzaty, S.T., M.E.
NIP. 197712052009122001

Mentor

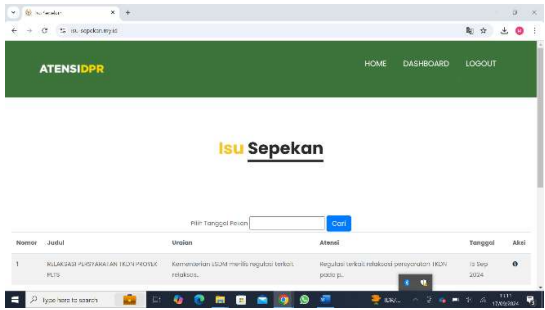
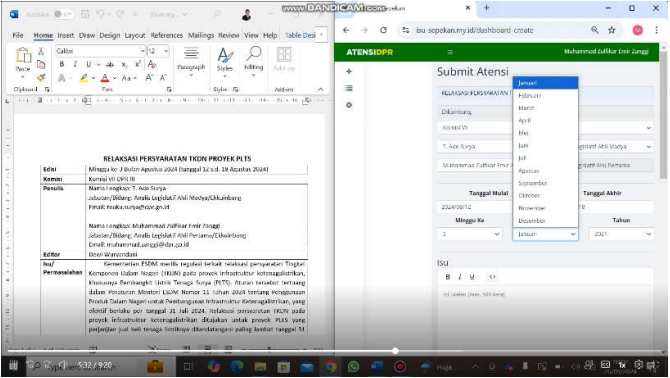
Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.
NIP. 197503262009122002



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4.

Nama : Muhammad Zulfikar Emir Zanggi
NIP : 199307202024041001
Unit Kerja : Pusat Analisis Keparlemenan
Isu : Ketidaktepatan waktu dalam publikasi atau penerbitan Isu Sepekan
Gagasan : Pemanfaatan Teknologi Informasi *Web Based* dalam Pembuatan Isu Sepekan

No.	Kegiatan	Evidence
1.	Melakukan konsultasi dengan coach dan mentor terkait finalisasi terkait rancangan aktualisasi.	Dapat diakses melalui: http://www.isu-sepekan.my.id UI/UX final: 
2.	Membuat video tutorial pembuatan Isu Sepekan menggunakan <i>web based</i> http://www.isu-sepekan.my.id	Bisa dilihat melalui link berikut: Video Demo Pembuatan Isu Sepekan.mp4 (sharepoint.com) 



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

2. Melakukan sosialisasi atau demo terkait penggunaan teknologi informasi web based dalam pembuatan Isu Sepekan yang dihadiri langsung oleh Mentor dan Bapak Kepala Pusat Analisis Keparlemenan.



Saat paparan:





SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp. (021) 5715 349 Fax. (021) 5715 423 / 5715 925 www.dpr.go.id

Jakarta, 18 September 2024

Yth.
Anastis Legibell dari Fakultas Keguruan
Pendidikan Universitas

Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat
Analisa Kependidikan telah menerima DPM RI berkenaan
pengembangan "Sistemasi Model Akademik Pendidikan Dasar CPNS
Kelas Binaan angkatan 18 Tahun 2024" yang akan dilaksanakan
dalam bentuk online.

Mari lampirkan :
- Surat : Juli 18, 20 September 2024
- Nomor : P.18.35.1118 - Binas
- Tanggal : Ruang Rapat Pusat Analisa Kependidikan
- Meeting ID : 858 088 4888
- Password : PUSANA

Selanjutnya dengan ter lampirkan, kami mengharapkan bantuan
Berkas untuk dapat hadir pada saat tersebut.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan bimbingan
Berkas kami ucapkan terima kasih.



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp. (021) 5715 349 Fax. (021) 5715 423 / 5715 925 www.dpr.go.id

SURABAYA DAN DEMONSTRASI PROGRAM AKTUALISASI PELATIHAN
DASAR CPNS MELAKUKAN PELATIHAN
REPARASI

SURABAYA AGORA

Waktu	Acara	Peserta/Staff
13.30 - 13.35	Pembukaan	Peserta acara
13.35 - 13.45	Sambutan	Kepala Pusat Analisa Kependidikan
13.45 - 13.50	Kata sambutan	Peserta acara
13.50 - 13.55	Pengantar agenda ke-1 sosialisasi	Mentor (dokter)
13.55 - 14.00	Agenda sosialisasi ke-1	Anggota DPR Provinsi Jawa Timur, S.S. S.T.
14.00 - 14.10	Tanggap	Peserta acara
14.10 - 14.15	Pengantar agenda ke-2 sosialisasi	Mentor (dokter)
14.15 - 14.25	Agenda sosialisasi ke-2	Mentor (dokter) Anggota DPR Provinsi Jawa Timur, S.S. S.T.
14.25 - 14.30	Tanggap	Peserta acara
14.30 - 14.35	Pengantar agenda ke-3 sosialisasi	Mentor (dokter)

Jakarta, 26 September 2024
Mengetahui,

Coach

Izzaty, S.T., M.E.
NIP. 197712052009122001

Mentor

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.
NIP. 197503262009122002



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/967/KU.03.02/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Jakarta, 19 September 2024

Yth.

**Analisis Legislatif dan Analisis Kebijakan
Pusat Analisis Keparlemenan**

Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI bermaksud mengadakan **“Sosialisasi Hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Analag Pusaka angkatan XI Tahun 2024”** yang akan dilaksanakan secara *hybrid* pada:

Hari, tanggal : Jum'at, 20 September 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Analisis Keparlemenan
Meeting ID : 959 2695 4089
Password : PUSAKA

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Saudara/i untuk dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara/I, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SOSIALISASI DAN DEMONSTRASI PROGRAM AKTUALISASI PELATIHAN
DASAR CPNS ANGKATAN XI ANALIS LEGISLATIF PUSAT ANALISIS
KEPARLEMENAN

SUSUNAN ACARA

Waktu	Acara	Pelaksana/Fasilitator
13.30 – 13.35	Pembukaan	Pembawa acara
13.35 – 13.45	Sambutan	Kepala Pusat Analisis Keparlemenan
13.45 – 13.50	Foto bersama	Pembawa acara
13.50 – 13.53	Pengantar agenda ke-1 sosialisasi	Mentor (<i>tentatif</i>)
13.53 – 14.05	Agenda sosialisasi ke-1 Pembuatan dan Sosialisasi Buku Saku “Manfaat, Dampak, dan Batasan Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Isu Parlemen”	Brigitta Diaz Primadita, S.Si., M.T.
14.05 – 14.10	Tanggapan	Pembawa acara
14.10 – 14.13	Pengantar agenda ke-2 sosialisasi	Mentor (<i>tentatif</i>)
14.13 – 14.25	Agenda sosialisasi ke-2 Pemanfaatan Teknologi Informasi <i>Web- Based</i> dalam Pembuatan Isu Sepekan	Muhammad Zulfikar Emir Zanggi, S.T., M.T.
14.25 – 14.30	Tanggapan	Pembawa acara
14.30 – 14.33	Pengantar agenda ke-3 sosialisasi	Mentor (<i>tentatif</i>)
14.33 – 14.45	Agenda sosialisasi ke-3 Optimalisasi <i>Knowledge Management</i> menggunakan Microsoft OneDrive sebagai wadah informasi untuk Mendukung Kebutuhan Informasi pada Unit Kerja Tim Pendampingan Komisi VI	Aditya Eka Pranandiansyah, S.Kom, M.M.
14.45 – 14.50	Tanggapan	Pembawa acara



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

14.50 – 14.53	Pengantar agenda ke-4 sosialisasi	Mentor (<i>tentatif</i>)
14.53 – 15.05	Agenda sosialisasi ke-4 Optimalisasi Penggunaan Google Docs dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Analis Legislatif yaitu Pelaksanaan Tugas Individu berupa Isu Harian dan Laporan Kegiatan Komisi (LKK)	Yiyis Aldi Mebra, S.E., M.B.A
15.05 – 15.10	Tanggapan	Pembawa acara
15.10 – 15.13	Pengantar agenda ke-5 sosialisasi	Mentor (<i>tentatif</i>)
15.13 – 15.25	Agenda sosialisasi ke-5 Penyediaan Data Primer Hubungan Bilateral Keparlemenan Melalui <i>Parliamentary Snapshot</i>	Devindra Oktaviano, S.IP., M.Han
15.25 – 15.30	Tanggapan	Pembawa acara
15.30 – 15.33	Pengantar agenda ke-6 sosialisasi	Mentor (<i>tentatif</i>)
15.33 – 15.45	Agenda sosialisasi ke-6 Optimalisasi Pengelolaan <i>Database</i> Produk Info Singkat dan Isu Sepekan di Pusat Analisis Keparlemenan	Aris Yan Jaya Mendrofa, S.T., M.Sc
15.45 – 15.50	Tanggapan	Pembawa acara
15.50 – 15.53	Pengantar agenda ke-7 sosialisasi	Mentor (<i>tentatif</i>)
15.53 – 16.05	Agenda sosialisasi ke-7 Penggunaan <i>Podcast</i> Youtube Sebagai Media Ekspose Info Singkat ke Masyarakat	Timothy Joseph Shekinah Glory, S.T., M.M.
16.05 – 16.10	Tanggapan	Pembawa acara
16.10 – 16.20	Penutupan	Pembawa acara



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR SOSIALISASI HASIL AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS ANALIS LEGISLATIF PUSAKA ANGKATAN XI TAHUN 2024**

NO.	NAMA	INSTANSI/BIDANG	PARAF
1.	Fitria Melinda	Ekkuinbang	
2.	Devindro Ramhu C.	Polhukam	
3.	Ulayya Sarfina	Ekkuinbang	
4.	Firyal Nabihah	Ekkuinbang	
5.	Chika Agishintya	Kesra	
6.	Ariesty Tri Mauleny	Ekkuinbang	
7.	Megatrikaria Kencbli	Ekkuinbang	
8.	M. Zakik Abidin	Ekkuinbang	
9.	M. Zulkar Emir Juggi	Ekkuinbang	
10.	B. Diaz P.	Ekkuinbang	
11.	Aditya Eka P.	Ekkuinbang	
12.	Fahran Rosandi	Kesra	
13.	Fahran Rosandi R	Ekkuinbang	
14.	Eva Murcia G.	Kesra	
15.	Rizky Allam ZP.	Ekkuinbang	
16.	Yiyis Aldi Mebra	Ekkuinbang	
17.	Riza Astari Yamin	Kesra	
18.	Mohammad Inson Firdaus	Ekkuinbang	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NO.	NAMA	INSTANSI/BIDANG	PARAF
19.	Adib Hermawan	Kesra	
20.	Sony Hendra P	EKKUINBANG	
21.	ULLY Ngesti Pratiwi	PUSAKA Polhukam	
22.	Puriarti Simanjuntak	Kesra	
23.	Desty Bulandari	Polhukam	
24.	JUSTINA SARI	POLHUKAM	
25.	Putu Ayu Dhanu R	Kesra	
26.	Timothy Joseph S. Gbay	Kesra	
27.	Aris Yan J. Mendroga	EKKUINBANG	
28.	Yosua . Pardamean. S	EKKUINBANG	
29.	AUDRY A.S	EKKUINBANG	
30.	Nadhirah Nurul Saleha Saegheh	EKKUINBANG	
31.	JEFFREY IVAN VINCENT	EKKUINBANG	
32.	ANUGRAH JIWITA JALI	EKKUINBANG	
33.	Fadila Putri Lenggo Geni	EKKUINBANG	
34.	Rahmat Sawalman	EKKUINBANG	
35.	Denisa Milla Nita	EKKUINBANG	
36.	Victor		
37.	Yulia Indahri		
38.	Sulis		
39.	Arr Muliarta G		
40.	Budiman		

**PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA
DALAM MEMBUAT RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS**

Nama Peserta : Ir. Muhammad Zulfikar Emir Zanggi, S.T., M.T.
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama
Instansi : Setjen DPR RI
Tempat Aktualisasi : Pusat Analisis Keparlemenan

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

Sangat Mampu/ Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu*

Membuat rancangan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar CPNS dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tingkat pendidikan S2 dan pengalaman bekerja sebelumnya, cukup memperlihatkan bagaimana Emir memiliki kapasitas sangat mampu bukan saja dalam menyusun rancangan aktualisasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi Analis Legislatif yang profesional dan ber-AKHLAK

Emir memiliki semangat kerja dan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sebagai bentuk implementasi nilai akuntabel dan kompeten

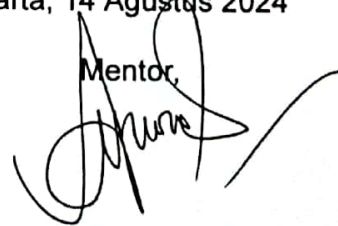
Dalam menyusun rancangan aktualisasi, Emir memahami dibutuhkannya evidence untuk bisa membaca keadaan dan lingkungan eksternal dengan baik, maka Emir melaksanakan semua arahan dengan baik dan bertanggung jawab. Baik melaksanakan wawancara dengan senior yang menangani Isu Sepekan, maupun mengambil data penilaian dari Analis Legislatif lainnya. Hal ini menunjukkan kemampuan Emir dalam berkolaborasi dan membangun harmoni

Bersama rekan satu kelompok mentor, Emir juga mau bekerja sama dan berkolaborasi saling mendukung

Emir juga memiliki sisi kepemimpinan yang dapat terus dikembangkan, sebagai wujud dari cinta tanah air

Jakarta, 14 Agustus 2024

Mentor,



Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.
NIP. 197503262009122002

Nama Peserta : Ir. Muhammad Zulfikar Emir Zanggi, S.T., M.T.
Nomor Daftar Hadir : 16
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Catatan/Saran:

- 1) Dasar hukum SK sebagai RITIK
- 2) Struktur organisasi perlu di-
perbaiki
- 3) Ketidaktepatan waktu publikasi
↑
Tdk ada teknologi?
- 4) Koordinasi dgn persidangan DPR.

Jakarta, 14 Agustus 2024

PENGUJI,



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
NIP. 196904221997031004



Pusat Analisis Keparlemenan Badan
Keahlian Setjen DPR RI

RELAKSASI PERSYARATAN TKDN PROYEK PLTS

T. Ade Surya

Analisis Legislatif Ahli Madya

teuku.surya@dpr.go.id

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi

Analisis Legislatif Ahli Pertama

muhammad.zanggi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian ESDM merilis regulasi terkait relaksasi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang efektif berlaku per tanggal 31 Juli 2024. Relaksasi persyaratan TKDN pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan ditujukan untuk proyek PLTS yang perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat tanggal 30 Juni 2026, sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Relaksasi persyaratan TKDN tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Adapun tujuan diberikannya relaksasi persyaratan TKDN ini untuk percepatan pengembangan PLTS di tanah air.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi persoalan proyek infrastruktur ketenagalistrikan berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), terutama yang pendanaannya berasal dari luar negeri. Selama ini terdapat banyak proyek PLTS yang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, namun pada akhirnya proyek PLTS tersebut tidak dapat direalisasikan karena terkendala persyaratan TKDN. Permasalahannya, lembaga keuangan internasional yang bersedia membiayai proyek PLTS menetapkan persyaratan agar tidak ada ketentuan TKDN dalam proses lelang. Persyaratan ini muncul karena banyak pengembang PLTS yang tidak dapat memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan pemerintah, di mana dalam ketentuan sebelumnya ditetapkan syarat TKDN minimal 40%. Di sisi lain, keterbatasan industri ketenagalistrikan dalam negeri juga menjadi penyebab sulitnya pengembang PLTS untuk memenuhi persyaratan TKDN.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya investasi di sektor EBT selama ini adalah adanya aturan mengenai persyaratan TKDN. Dengan dirilisnya regulasi mengenai relaksasi persyaratan TKDN diharapkan dapat mengakselerasi percepatan investasi proyek-proyek EBT di tanah air, khususnya PLTS. Dalam regulasi mengenai relaksasi persyaratan TKDN ini disebutkan dana hibah dari luar negeri untuk proyek EBT dapat untuk tidak mencantumkan TKDN bagi perusahaan yang sudah mempunyai Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero) sampai dengan 31 Desember 2024. Pada dasarnya, regulasi mengenai relaksasi persyaratan TKDN proyek EBT tetap mengacu pada keputusan Kementerian Perindustrian terkait perhitungan TKDN, namun terdapat penambahan perhitungan TKDN dari sisi komponen biaya, seperti biaya instalasi proyek, feasibility study, proses desain rekayasa, hingga biaya logistik pengiriman. Berdasarkan RUPTL Tahun 2021-2030, Indonesia masih membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga 7,4 gigawatt pada tahun 2025. Sementara investasi yang dibutuhkan untuk proyek EBT sampai dengan tahun 2030 mencapai USD55,18 miliar atau sekitar Rp876 triliun.

Pada prinsipnya, regulasi relaksasi persyaratan TKDN proyek infrastruktur ketenagalistrikan memang diperlukan untuk mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT, khususnya PLTS, sekaligus sebagai upaya untuk mencapai target bauran energi nasional dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, kebijakan ini bersifat sementara sehingga fokus sebaiknya diarahkan pada penguatan industri ketenagalistrikan dalam negeri agar ke depan persyaratan TKDN untuk proyek PLTS dapat dengan mudah terpenuhi.

Atensi DPR

Regulasi terkait relaksasi persyaratan TKDN pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor EBT, terutama dalam upaya percepatan pengembangan PLTS di tanah air. Selama ini, proyek-proyek PLTS khususnya yang pendanaannya berasal dari luar negeri tidak dapat direalisasikan karena terkendala persyaratan TKDN yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar minimal 40%. Sementara itu, kapasitas industri ketenagalistrikan nasional juga masih terbatas untuk memudahkan pengembang PLTS memenuhi persyaratan TKDN. Komisi VII DPR RI yang membidangi energi perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan relaksasi persyaratan TKDN agar tetap sesuai dengan koridor pengaturannya. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan industri ketenagalistrikan dalam negeri dari hulu hingga ke hilir.

Sumber

cnbcindonesia.com, 12 dan 13 Agustus 2024;

esdm.go.id, 13 Agustus 2024;

katadata.co.id, 14 Agustus 2024; dan

Kontan, 12 dan 15 Agustus 2024.